

af



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TAHUN 2024





**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi (LKjIP) Pemerintah Pengadilan Militer I-02 Medan untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Militer I-02 Medan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Medan, 5 Februari 2025

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan,

Masykur, S.T., S.H., M.H.

Kolonei Cnk 11970020230871

**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

No	Pernyataan	Checklist	
<b>I</b>	<b>Format</b>	1. Laporan Kinerja (LKj) telah	✓
		2. menampilkan data penting IP	✓
		3. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		4. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		5. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		6. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		7. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
<b>II</b>	<b>Mekanisme Penyusunan</b>	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja	✓
<b>III</b>	<b>Subtansi</b>	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jikabutir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓

	7. Telahter dapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
	9. IKUdanIKtelahSMART	✓

Medan, 5 Februari 2025

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan,



Masykur, S.T., S.H., M.H.

Kolonel Chk 11970020230871

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-02 Medan merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2023 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pengadilan Militer I-02 Medan melihat setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam memenuhi target yang ada sebagai media evaluasi sebagai pemicu peningkatan kinerja kedepan

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat atas mandat yang diamanatkan dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan.

*Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-02 Medan dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di Pengadilan Militer I-02 Medan.*



Medan, 5 Februari 2025  
Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan

  
Masykur, S.T., S.H., M.H.  
Kolonel Chk 11970020230871

# Ringkasan Eksekutif

Dari 6 indikator kinerja utama untuk 3 sasaran strategis, semua indikator dinyatakan memenuhi target "berhasil" yaitu memenuhi capaian diatas 100% dan melebihi target yang

Laporan Kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan merupakan wujud dari kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan dalam pencapaian visi dan misinya, sebagaimana dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, pada tahun 2024 Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja untuk mengukur sasaran tersebut.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 terdapat sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan capaian lebih dari 100 %. Dan ada yang mencapai 90 % dan kesemua sasaran melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dilihat sebagai berikut:

## I. Sasaran Strategis : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dengan capain rata-rata 111.08 %

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90 %	100 %	111.11 %
b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	70 %	78.20 %	111.71 %
c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	70 %	80.06 %	114.37 %
d. Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	94.39 %	104.87 %
<b>Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis I</b>			<b>110.51 %</b>

## II. Sasaran Strategis : Peningkatan Efektifitas Penyelesaian Perkara

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
<i>Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu</i>	95 %	100%	105.26 %
<b>Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis II</b>			<b>105.26 %</b>

## III. Sasaran Strategis : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>		<b>CAPAIAN</b>
<i>a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</i>	80 %	100 %	125.00 %
<b>Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis III</b>			<b>125.00 %</b>

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi .....	12
D. Isu Strategis .....	17
E. Sistematika Penyajian.....	18
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis 2020 – 2024.....	20
1. Visi .....	20
2. Misi .....	21
3. Tujuan .....	21
4. Sasaran Strategis.....	21
5. Program dan Kegiatan .....	23
B. Rencana Kinerja Tahun 2023 .....	26
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	32
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	34
1. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	34
2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan capaian beberapa tahun terakhir.....	37
3. Perbandingan Reliasasi Kinerja dengan target jangka menengah .....	38
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional(MARI) .....	40
5. Analisis penyebab keberhasilan dan keagal serta alternatif Solusi ..	42
6. Analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya .....	54
7. Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan	63



B. Realisasi Anggaran .....	52
1. Realisasi DIPA 01 (663199 – Badan Urusan Administrasi) .....	64
2. Realisasi DIPA 05 (663200 – Ditjen Badilmiltun MARI) .....	65
<b>BAB IV. PENUTUPAN</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Rekomendasi .....	69
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>
1. Pernyataan Telah di Reviu .....	I
2. Cheklist Reviu .....	II
3. SK Tim Penyusun LKjIP .....	III
4. Penghargaan .....	IV
5. Struktur Organisasi .....	V
6. Indikator Kinerja Utama .....	VI
7. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	VII
8. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	VIII
9. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	IX
10. Pengukuran Kinerja .....	X
11. Laporan Realisasi Anggaran .....	XI
12. Monev Rencana Aksi TW IV .....	XII

# DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Daftar kendaraan dinas Pengadilan Militer I-02 Medan
- Tabel 2 : Personel Pengadilan Militer I-02 Medan
- Tabel 3 : Renstra Pengadilan Militer I-02 Medan 2020 – 2024
- Tabel 4 : Rencana Kinerja Tahun 2024
- Tabel 5 : Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Tabel 6 : Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024
- Tabel 7 : Perbandingan Realisasi Sasaran Kinerja 2022-2024
- Tabel 8 : Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
- Tabel 9 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional (Mahkamah Agung RI)
- Tabel 10 : Capaian Kinerja Organisasi Sasaran I  
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- Tabel 11 : Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Tabel 12 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
- Tabel 13 : Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
- Tabel 14 : Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan
- Tabel 15 : Capaian Sasaran II Tahun 2020 s.d 2024  
Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu
- Tabel 16 : Capaian Sasaran III Tahun 2019 s. d 2024  
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- Tabel 17 : Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Tabel 18 : Komposisi Sumber Daya Manusia
- Tabel 19 : Daftar Pelatihan Yang diikuti Aparatur Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2024
- Tabel 20 : Realisasi Anggaran Dipa BUA (01)
- Tabel 21 : Realisasi Anggaran Dipa Ditjen (05)

# DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1 : Capaian Sasaran I Tahun 2020 s.d 2024 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- Grafik 2 : Capaian Sasaran Ib :  
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
- Grafik 3 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
- Grafik 4 : Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan
- Grafik 5 : Capaian sasaran II  
Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu
- Grafik 6 : Capaian Sasaran III Tahun 2020 s. d 2024  
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- Grafik 7 : Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Garfik 8 : Realisasi Anggaran DIPA 01
- Garifk 9 : Realisasi Anggaran DIPA 05

# DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Peta Wilayah Provinsi Sumatera Utara
- Gambar 2 : Peta Wilayah Hukum Dilmil I-02 Medan
- Gambar 3 : Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-02 Medan
- Gambar 4 : Visi , Misi dan Tujuan



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

**P**engadilan Militer I-02 Medan merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas mengadili perkara tingkat pertama dan berkedudukan di ibukota propinsi Sumatera Utara Medan. Tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-02 Medan selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Militer, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Militer I-02 Medan dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Semuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Militer I-02 Medan dituntut untuk melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Militer I-02 Medan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang

diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Pengadilan Militer I-02 Medan memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya.

Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Militer I-02 Medan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2021 untuk mencapai visi dan misinya. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja ini juga disusun sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan berkedudukan di ibukota propinsi Sumatera Utara Kota Medan, dengan alamat Jln. Ngumban Surbakti No. 45 Medan, Telepon/Fax (061) 80047002 website: [www.dilmil-medan.go.id](http://www.dilmil-medan.go.id), email: [dilmil102md@gmail.com](mailto:dilmil102md@gmail.com).

## **B. KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **1. Kedudukan**

Pengadilan Militer I-02 Medan secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Planetarian dan Kesekretariatan Peradilan.

Kedudukan Pengadilan Militer diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

**a. Letak Geografis**

Pengadilan Militer I-02 Medan terletak pada garis 10 - 40 Lintang Utara dan 980 - 1000 Bujur Timur, Provinsi ini berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain: di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, di sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia, Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/ kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur, Kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kota Sibolga dan Kota Gunungsitoli, Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kota Pematangsiantar, Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai.

Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 72,981,23 km<sup>2</sup>, sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur pantai Pulau Sumatera, Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah Kabupaten Langkat dengan luas 6,262,00 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,58 persen dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6,134,00 km<sup>2</sup> atau 8,40 persen, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6,030,47 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,26 persen,

Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,04 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara.

**Gambar 1**  
**Peta Wilayah Provinsi Sumatera Utara**



**b. Wilayah Hukum**

Pengadilan Militer I-02 Medan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam wilayah hukum pada Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

- Rindam I/BB
- Kodim 0201/BS
- Yonif 100/Raiders
- Yonkav 6/Serbu Naga Karimata
- Yonzipur 1/Dhira Dharma
- Yonarmed 2/105 Kilap Sumagan



- Yon Arhanudse 11/BS
- Yon Arhanudse 13
- HUBDAM I/BB (Medan)
- ZIDAM I/BB (Medan)
- PALDAM I/BB (Medan)
- POMDAM I/BB (Medan)
- KESDAM I/BB (Medan)
- AJENDAM I/BB (Medan)
- PENDAM I/BB (Medan)
- BINTALDAM I/BB (Medan)
- INFOLAHTADAM I/BB (Medan)
- JASDAM I/BB (Medan)
- BEKANGDAM I/BB (Medan)

Berikutnya adalah Korem dan jajarannya :

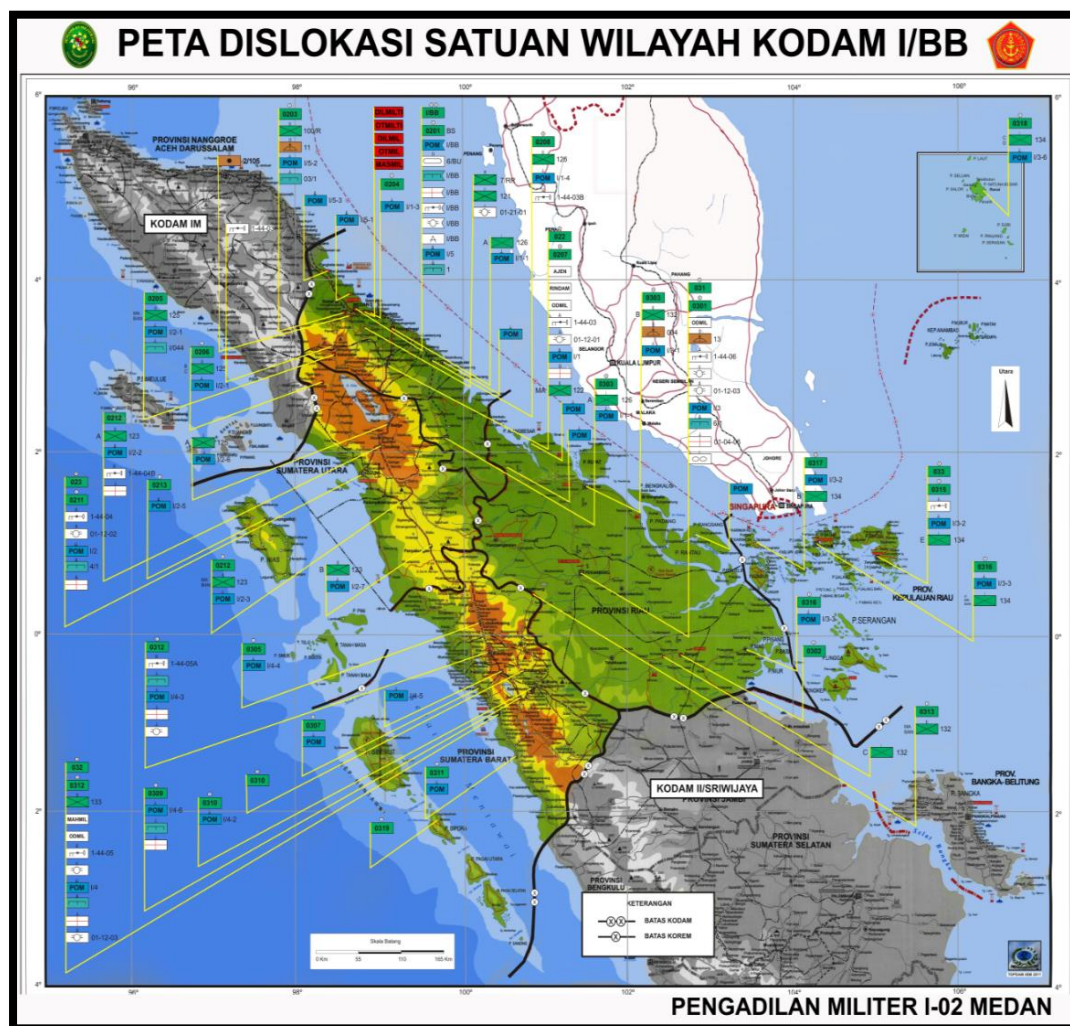
1. Korem 022/Pantai Timur (PT)
  - Kodim 0203/Langkat
  - Kodim 0204/Deli Serdang
  - Kodim 0207/Simalungun
  - Kodim 0208/Asahan
  - Kodim 0209/LabuhanBatu
2. Korem 023/Kawal Samudra (KS)
  - Kodim 0205/Tanah Karo
  - Kodim 0206/Dairi
  - Kodim 0210/Tapanuli Utara
  - Kodim 0211/Tapanuli Tengah
  - Kodim 0212/Tapanuli Selatan
  - Kodim 0213/Nias
3. Resimen Induk Kodam I/Bukit Barisan  
Batalyon terdiri dari:
  - Yonif 121/Macan Kumbang
  - Yonif 122/Tombak Sakti
  - Yonif 123/Rajawali
  - Yonif 125/Simbisa
  - Yonif 126/Kalacakti

- Yonif 131/Braja Sakti
- Yonif 132/Bima Sakti
- Yonif 133/Yudha Sakti
- Yonif 134/Tuah Sakti

II. Lanud Soewondo Medan

III. Lantamal I Belawan

**Gambar 2 :**  
**Peta Wilayah Hukum Dilmil I-02 Medan**



Dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Pengadilan Militer I-02 memiliki Gedung utama representative dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan prototype Pengadilan pada umumnya yang telah diresmikan pada tahun 2011 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bpk Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, SH, MH. Gedung yang dimiliki Pengadilan Militer I-02 Medan per 31 Desember 2021 yaitu:

Gedung Bangunan Kantor Permanen seluas 1.250 m<sup>2</sup> dan Halaman gedung kantor seluas : 650 m<sup>2</sup>. Namun untuk menunjang kesejahteraan pimpinan dan para Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan belum memiliki rumah dinas (rumah Negara) . Untuk menunjang mobilitas rutin pimpinan maupun operasional kantor Pengadilan Militer I-02 Medan memiliki 4 (empat) kendaraan Dinas Roda 4 dan 4 (empat) kendaraan dinas roda 2 (dua).

**Tabel 1**  
**Daftar kendaraan dinas Pengadilan Militer I-02 Medan**

No	Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Kondisi			Ket
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I Jenis Kendaraan Roda 4</b>							<b>Kondisi</b>
1	Toyota Kijang Innova Reborn	2020	1	✓			99 %
2	Toyota Avanza	2009	1	✓			75
3	Toyota Kijang Innova E	2008	1		✓		60 %
4	Nissan Grand Livina	2011	1	✓			75 %
<b>II Jenis Kendaraan Roda 2</b>							
1	Honda GL Max	2005	1		✓		60 %
2	Honda Mega Pro STD	2007	1	✓			75 %
3	Honda Supra X 125	2007	1	✓			75 %
4	Honda Supra X 125	2008	2	✓			75 %

Jumlah sumber daya manusia di Pengadilan Militer I-02 Medan sampai akhir tahun 2024 adalah berjumlah 40 pegawai (Militer, PNS dan PPPK) dan 9 tenaga honorer dengan komposisi sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Jumlah SDM Pengadilan Militer I-02 Medan**

No	Nama	Jabatan	Pangkat	Gol.	Pendidikan
1	2	3	4	5	6
1.	Masykur, S.T., S.H., M.H.	Kadilmil I-02 Medan	Kolonel Chk		PASCASARJANA
2	L.M. Hutabarat, S.H., M.H.	Pokkimmil	Letnan Kolonel Chk		PASCASARJANA
3	Djuanaedi, S.H.	Pokkimmil	Letnan Kolonel Chk		STRATA I
4	Ziky Suryadi, S.H.,M.H.	Pokkimmil	Letnan KUM		PASCASARJANA
5	Indra Gunawan, S.H., M.H.	Pokkimmil	Mayor Chk		PASCASARJANA
6	Wiwid Ariyanto S., S.H.,M.H.	Pokkimmil	Mayor Chk		PASCASARJANA
7	Iskandar Zulkarnaen, S.T.,S.H.,M.H.	Pokkimmil	Mayor Chk		PASCASARJANA
8	Alex Birawah,S.H.	Pokkimmil	Mayor Chk		STRATA I
9	Slamet Purwo Widodo, S.I.P., S.H., M.H.	Pokkimmil	Kapten Chk		PASCASARJANA
10	Nurafni, S.H	Panitera	Kapten Chk (K)		STRATA I
11	Wintar Limbong, S. Kom	Kasubbag PTIP	Penata Tk. I	III/d	STRATA I
12	Muhammad Yusuf	Kasubbag Kepegawaian	Penata Tk. I	III/d	STRATA I
13	Dessy Rahayu, SE	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata Tk. I	III/d	STRATA I
14	Miyas, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Lettu Chk		PASCASARJANA
15	Ribut Budi Santoso, SH	Panitera Pengganti	Peltu		STRATA I
16	Titim Martini,S.H.	Panitera Pengganti	Peltu		STRATA I
17	Reza Pahlepi	Panitera Pengganti	Peltu		SMA
18	Rudi	Panitera Pengganti	Pelda		SMA

<b>19</b>	Frisilia Pardosi, S.Sos	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Penata Muda TK I	III/b	STRATA I
<b>20</b>	Mahyuni,SH	Klerek - Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum Pengadilan	Penata Tk. I	III/d	STRATA I
<b>21</b>	Deny Faisal,SH	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Penata	III/c	STRATA I
<b>22</b>	Nurmansya Saragi	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran, Subbagian Umum dan Keuangan	Penata Muda TK I	III/b	SMA
<b>23</b>	Bobby Harianto Sinaga, S.H	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Penata Muda TK. I	III/b	STRATA I
<b>24</b>	Sri Ulina Ginting, S. Psi, M.Sc.	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Penata Muda TK. I	III/b	PASCASARJANA
<b>25</b>	Pintawati Nababan, S.H	Klerek - Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana	Penata Muda TK.I	III/b	STRATA I
<b>26</b>	Sangkot Puli, S.H., M.H.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, Sekretaris	Penata Muda TK. I	III/b	PASCASARJANA
<b>27</b>	Muhammad Hadi Wirza, SE	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan	Penata Muda	III/b	STRATA I

<b>28</b>	Seva Sontyana Limbong, Amd.Kom	Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Pengatur	II/d	DIPLOMA
<b>29</b>	Rospita Sitinjank, A.Md	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Pidana	Pengatur	II/c	DIPLOMA
<b>30</b>	Tua Parulian Siringo-ringo, A.Md	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Pidana	Pengatur	II/c	DIPLOMA
<b>31</b>	Eggi Febio Canavari, A.Md.A.B.	Arsiparis Terampil	PPPK	VII	DIPLOMA
<b>32</b>	Yenni Sagala	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Pidana	Pelda		SMA
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>33</b>	Parlindungan Saragih,S.H	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Pidana	Serma		STRATA I
<b>34</b>	Arif Siagian	Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Subbagian Umum dan Keuangan	Serma		SMA
<b>35</b>	Siman Silaban	Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Panitera Muda Hukum.	Serma		SMA
<b>36</b>	Hendro Bastian	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Subbagian Umum dan Keuangan.	Serka		SMA
<b>37</b>	Bramono	Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Subbagian Umum dan Keuangan.	Serka		SMA
<b>38</b>	Dede Sulaiman	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran, Panitera Muda Hukum.	Serda		SMA
<b>39</b>	Juharsah	Klerek- Pengolah Data dan Informasi, Panitera Muda Hukum.	Kopral Kepala		SMA

40	Irwan Saragih	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran, Panitera Muda Pidana.	Kopral Dua		SMA
41	Budianto, ST	PPNPN	-	-	STRATA I
42	Razali Lubis, SE	PPNPN	-	-	STRATA I
43	Elda Ertika, S.H	PPNPN	-	-	STRATA I
44	Milfan Arief	PPNPN	-	-	SMA
45	Ilman Tampubolon, Amd	PPNPN	-	-	DIPLOMA
46	Risma Perwani	PPNPN	-	-	SMA
47	Prayogi	PPNPN	-	-	SMA
48	Marcoes Nictanov Tentero	PPNPN	-	-	SMA
49	Rais Martinus Kaban	PPNPN	-	-	DIPLOMA

## 2. Wewenang

Wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan memutuskan dan memeriksa perkara pidana dengan satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota dalam tingkat pertama serta dibantu oleh satu orang Panitera dan dihadiri satu orang oditur militer Tugas Pengadilan Militer I-02 Medan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 12 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga menjelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran. Justisabel Peradilan Militer adalah mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran masih berdinis aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Militer I-02 Medan memiliki fungsi sebagai berikut

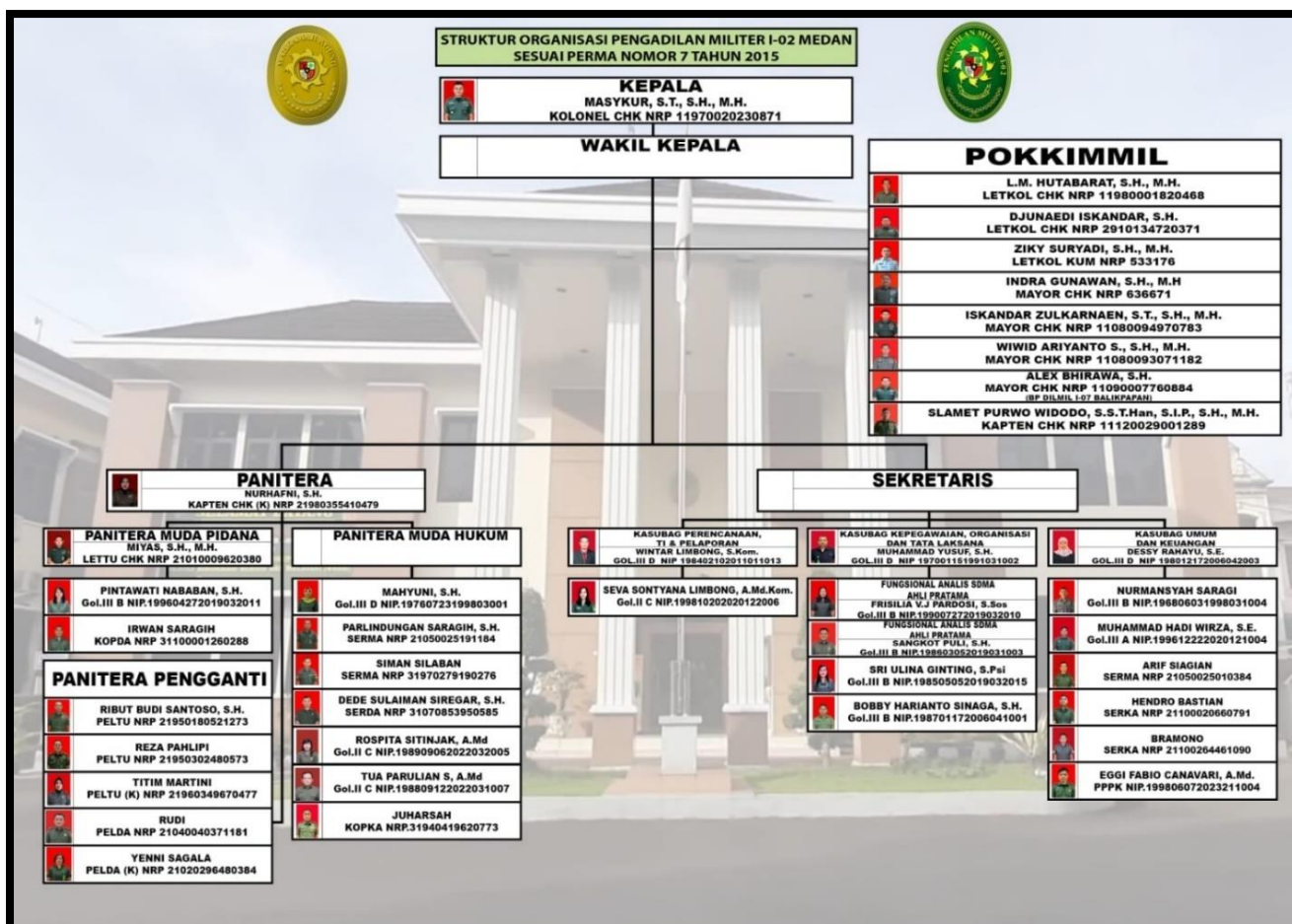
- a. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan militer I-02 Medan;
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan Pembangunan;
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum;
- d. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Militer di daerah hukumnya apabila diminta;
- e. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Pada Tahun 2016, struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Militer I-02 Medan mengalami perubahan, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pada numenklatur yang baru, jabatan Panitera dan jabatan Sekretaris terpisah. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Miliiter I-02 Medan sebagai berikut. Pada Tahun 2016, struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Militer I-02 Medan mengalami perubahan, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pada numenklatur yang baru, jabatan Panitera dan jabatan Sekretaris terpisah. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Miliiter I-02 Medan sebagai berikut:



**Gambar 3**  
**Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-02 Medan**



Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing jabatan sesuai struktur organisasi di atas, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut:

- 1. KEPALA PENGADILAN** sebagai kawal depan (voorpost) Makamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya laporan penanganan perkara pertama yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Makamah Agung dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.
- 2. WAKIL KEPALA PENGADILAN** adalah melaksanakan tugas kepala apabila kepala berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh kepala kepadanya.

**3. HAKIM** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di pengadilan tersebut yang ditugaskan kepadanya serta mengurus keputusan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim yang bersangkutan.

**4. PANITERA** adalah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. secara rinci tugas dan fungsi Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pelanggaran;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. Pembinaan teknis kepaniteraan, dan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer.

**5. SEKRETARIS** adalah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Secara rinci tugas dan fungsi Sekretaris Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan

- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer.

**6. PANITERA MUDA PIDANA** adalah bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana
- c. Pelaksanaan registrasi perkara;
- d. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
- f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Kepala;
- g. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- i. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- n. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- o. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- q. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;

r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

**7. PANITERA MUDA HUKUM** adalah bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara dibidang Pidana Hukum. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat, dan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

**8. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN** adalah bertugas membantu Bagian Perencanaan Dan dalam melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantuan, evaluasi, dokumentasi.pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta peyusunan laporan.

**9. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN** adalah bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Secara rinci tugas dan fungsi Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
- c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan,akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

**10. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA** adalah bertugas untuk melaksanakan urusan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.

**11. PANITERA PENGGANTI** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, menetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

#### **D. ISU STRATEGIS**

**P**engadilan Militer I-02 Medan sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki peran yang sangat penting, mengingat Pengadilan Militer I-02 Medan menerima, memeriksa serta memutus perkara yang diberikan kepadanya yaitu prajurit mulai dari pangkat prajurit sampai dengan kapten.

Peran strategis Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai pengadilan tingkat pertama adalah dalam hal mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukumnya, serta memberikan pelayanan dan penerangan / pembinaan hukum di wilayah Sumatera utara. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer I-02 Medan masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya, termasuk di Pengadilan Militer I-02 Medan adalah:

1. Produktifitas penyelesaian perkara. Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dituntut untuk tidak pernah berhenti meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. Termasuk Pengadilan Militer I-02 Medan setiap tahunnya terus dipacu untuk lebih optimal dalam menyelesaikan perkara agar tidak terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dari 5 (lima) bulan.
2. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparaturnya untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan peradilan umumnya.
3. Putusan pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan

Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat pertama tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum banding kasasi dan peninjauan kembali.

4. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan.
5. Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang excellent (seperti: independency, integrity, akuntability, responsibility, transparanty, impartial, dan equality) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.
6. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan utama dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaruan.

## **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategisc issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat bahwa salah satu arah rencana pembangunan jangka panjang adalah pementapan kelembagaan hukum yang antara lain meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum, serta organisasi hukum lainnya agar semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban; kepastian hukum; dan memberikan keadilan kepada masyarakat banyak serta mendukung pembangunan. Selanjutnya dalam RPJPN dinyatakan bahwa tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2020-2024 diarahkan pada peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap. Berdasarkan RPJMN tersebut, Pengadilan Militer I-02 Medan menyusun Rencana Strategis 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

#### VISI

*Visi pengadilan Militer I-02 Medan mengacu pada Visi Mahkamah Agung, yaitu :  
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”*

#### 1. VISI

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Militer I-02 Medan untuk menjadikan Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.



**Gambar 4**  
**Visi , Misi dan Tujuan**



## **2. Misi**

Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah dirumuskan Misi Pengadilan Militer I-02 Medan, sesuai misi Mahkamah Agung adalah:

- 1) Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
- 2) Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan.

## **3. Tujuan**

Dari visi dan misi yang telah dirumuskan, selanjutnya ditetapkan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer I-02 Medan, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kepastian hukum
- 2) Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
- 3) Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan.

## **4. Sasaran Strategis**

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1) Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel adalah :

**a. Peningkatan penyelesaian perkara.**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan
- maksimal 5 (Lima ) bulan kecuali perkara desersi.

**b. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali

**c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

- Persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap
- Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
- Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

2) Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan keterjangkauan pelayanan badan peradilan adalah :

Peningkatan aksesibilitas masyarakat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.

3) Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan adalah :

Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut,

namun bukan indikator kinerja utama adalah :

- Persentase pengelolaan aparaturnya peradilan yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu
- Persentase pengelolaan Barang Milik Negara
- Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti
- Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
- Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan

## 5. Program Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis , Pengadilan Militer I-02 Medan menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

a. Program : **Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.**

Kegiatan : **Pembinaan administrasi dan pengelolaa**

- 1) penyelesaian perkara akseptabilitas putusan Hakim

b. Program : **Peningkatan manajemen peradilan Militer dan TUN.**

Kegiatan : **Peningkatan manajemen peradilan Militer dan TUN.**

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- 1) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

c. Program : **Peningkatan manajemen peradilan Militer dan TUN.**

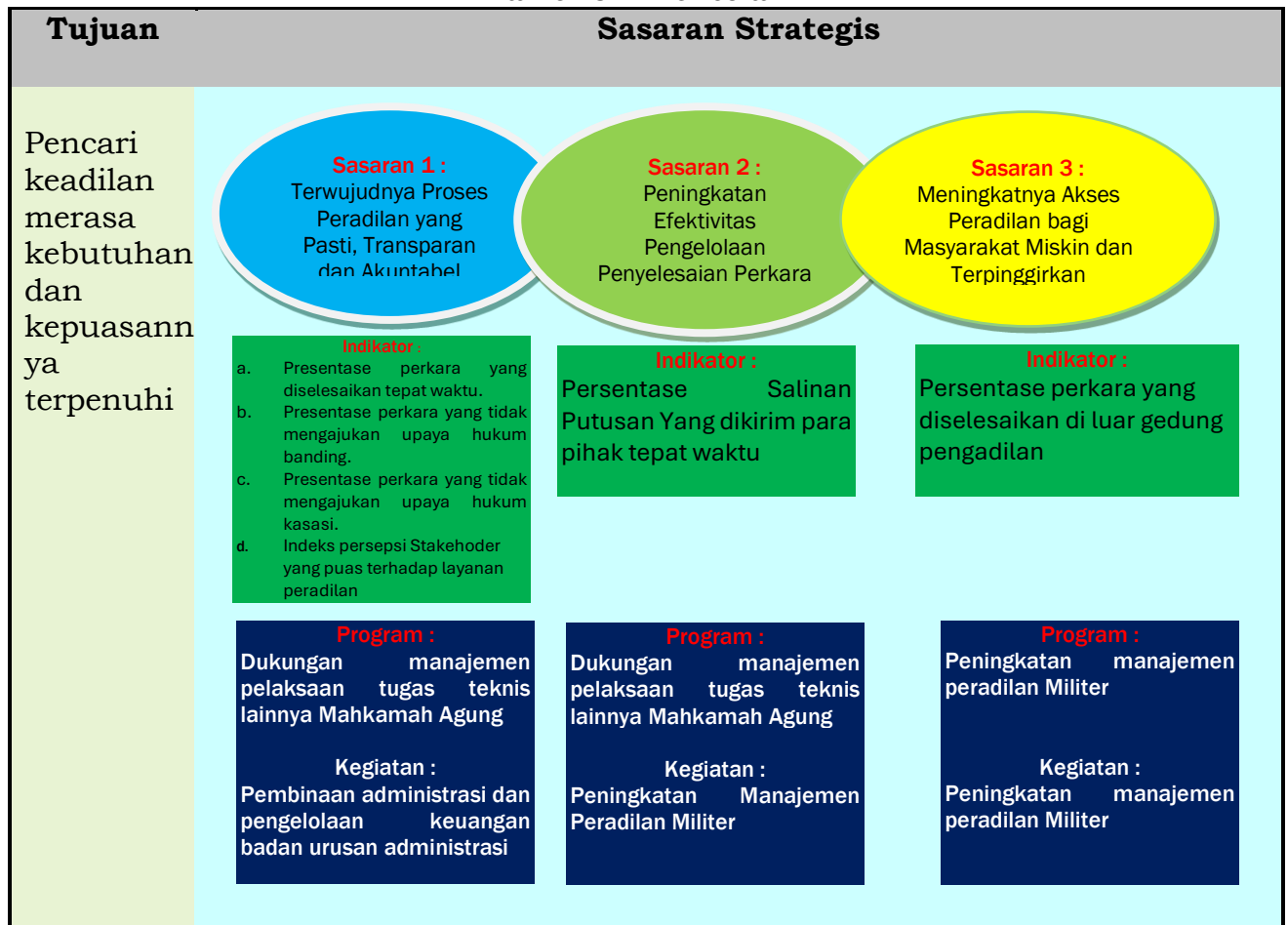
Kegiatan : **Peningkatan manajemen peradilan Militer dan TUN.**

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- 1) Peningkatan aksesibilitas masyarakat
- 2) Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

## 6. Framework Renstra Pengadilan Militer I-02 Medan

Gambar 5  
Framework Renstra



**Tabel 3**  
**Renstra Pengadilan Militer I-02 Medan 2020 – 2024**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN		
				2020	2021	2022	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	85%	90%	90%	90%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
				b.	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	80 %	85 %	90 %	70 %	70 %		
				c.	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	80 %	85 %	90 %	70 %	70 %		
				d.	Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	95 %	95 %	95 %	90 %	90 %		
		2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara		Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	90%	95%	97%	95%	95%		
		3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	80%	85%	90%	80%	80%	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

## B. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Militer I-02 Medan memuat angka target kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2023. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

**Tabel 4**  
**Rencana Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran / Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. d. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90 % 70 % 70 % 90 %
2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80 %
4	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	98 %

	Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98 %
	Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.	97 %

## 1. Keterangan Indikator Kinerja Tahunan : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

### a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang ada. Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut:

- 1) SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- 2) Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- 3) Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- 4) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- 5) Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas.

Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan target pada Tahun 2024 sebesar 90% terhadap pencapaian penyelesaian perkara kejahatan dan

pelanggaran putus tepat waktu. Target penyelesaian perkara juga memperhitungkan target penyelesaian perkara pada Program Kerja Tahun 2024 dibandingkan dengan jumlah perkara rata-rata yang masuk setiap tahun. Dan menetapkan target jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan pada Tahun 2024 sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai karena perkara pelanggaran (vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) dipastikan setelah sidang langsung putus karena proses penyelesaian melalui acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal, sesuai dengan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian, target yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar 100%, diharapkan dapat terpenuhi.

**b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding diambil dari perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding.
- 2) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan target pada Tahun 2024 sebesar 70% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang tidak mengajukan upaya hukum berdasarkan data perkara pada laporan tahunan, dengan demikian, target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada Tahun 2024 sebesar 70% diharapkan dapat terpenuhi.

**c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi diambil dari perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya



hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.
- 2) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- 3) Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan target pada Tahun 2024 sebesar 70% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang tidak mengajukan upaya hukum berdasarkan data perkara pada laporan tahunan pada tahun anggaran 2020 dan Tahun 2023. Dengan demikian, target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada Tahun 2024 sebesar 70% diharapkan dapat terpenuhi.

**d. Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan**

Persentase index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan diambil dari evaluasi atas komponen hasil yaitu survei kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan target index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Tahun 2024 sebesar 90%, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dengan demikian, target index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Tahun 2024 sebesar 90% diharapkan dapat terpenuhi.

## 2. 1. Keterangan Indikator Kinerja Tahunan : Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara

### **✚ Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu**

Persentase salinan putusan yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu diambil dari perbandingan antara Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan. Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

- 1) SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
- 2) Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan Putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM dan Ankum dan sesuai dengan ketentuan.
- 3) Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- 4) Papera : Perwira Penyerah Perkara.
- 5) Odmil : Oditur Militer.
- 6) PM : Polisi Militer.
- 7) Ankum : Atasan yang berhak menghukum.

Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan target salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu pada Tahun 2024 sebesar 95%. Demikian pula dengan berkas dilimpahkan dari Oditurat Militer I-02 Medan segera diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, untuk kemudian diputus dan diselesaikan (diminutasi) dengan memenuhi ketentuan acara yang berlaku. Dengan harapan, setiap perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dapat dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu pada Tahun 2024 mencapai 95%.

### 3. Indikator Kinerja Tahunan : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

#### **✚ Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan**

Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan diambil dari perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan. Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
- 2) Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar gedung Pengadilan dalam rangka percepatan perkara.
- 3) Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (rensidkan).

Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan target perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Tahun 2024 sebesar 80 % dengan pertimbangan bahwa perkara kejahatan yang dirensidkan untuk sidang keliling (zitting plats) harus diputus semuanya. Namun perkara akan disidangkan untuk sidang keliling tergantung dari perkara yang masuk yang berlokasi di daerah yang direncanakan untuk pelaksanaan sidang keliling. Selain dari itu dipengaruhi alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sidang keliling. Dengan demikian, target pada Tahun 2024 sebesar 80% diharapkan dapat terpenuhi.

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Militer I-02 Medan mendapat anggaran dengan total pagu awal Rp 5.222.775.000,- (lima miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari anggaran pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI sebesar Rp 5.073.965.000,- (lima miliar tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan anggaran pada DIPA Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI sebesar Rp 148.810.000 (seratus empat puluh delapan juta dealapan ratus sepuluh ribu rupiah).

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kerja.

**Tabel 5.**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. d. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90 % 70 % 70 % 90 %
2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80 %

4	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	98 %
		Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98 %
		Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.	97 %

No	Program	Anggaran
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 5.073.965.000
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Rp. 148.810.000
<b>Total</b>		<b>Rp. 5.222.775.000</b>



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**A**kuntabilitas kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2024. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

### A. CAPAIAN ORGANISASI

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

#### 1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan pada tahun 2024 dinyatakan “berhasil”, karena pada tiga sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata capaian lebih dari 100% yaitu: 110,95% untuk sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 105,26% untuk sasaran strategis “Peningkatan efektivitas pengelolaan

penyelesaian perkara”, 125.00 % untuk sasaran strategis “Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan”. Namun rata-rata capaian seluruh indikator sebesar 113.73%. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 6**  
**Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN %
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90 %	100%	111.11%
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	70 %	78.20%	111.71%
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	70 %	80.06%	114.37%
		d. Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	94.39%	104.87%
2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95 %	100%	105.26%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80 %	100%	125.00%
4	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan	Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi	98 %	100%	102.04%

Militer I-02 Medan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan			
	Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98 %	100%	102.04%
	Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.	97 %	100%	103.09%
<b>Rata-rata</b>				<b>108.83%</b>

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2024 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Capaian Kinerja berikut Ini. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2024 secara umum Pengadilan Militer I-02 Medan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari



pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Target kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan 2024 merupakan tahun kelima dalam dokumen Rencana Strategis 20120-2024. Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Militer I-02 Medan selama periode tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran Kinerja 2022-2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi %			Capaian %		
			2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90 %	100	100	100	111.11	111.11	111.11
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	70 %	75.70	76.00	78.20	84.11	108.57	111.71
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	70 %	79.43	79.43	80.06	88.25	125.71	114.37
		d. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	97.92	96.43	94.39	103.07	107.14	104.87
2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95 %	100	100	100	100	105.26	105.26
3	Meningkatnya Akses	Persentase perkara yang diselesaikan	80 %	123.07	100	100	136.74	125	125.00

Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	di luar gedung pengadilan								
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Hasil perhitungan capaian kinerja pada tabel diatas diukur dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hasil capaian kinerja berupa realisasi penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-02 Medan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan beberapa tahun terakhir tergolong baik dan mengalami peningkatan setiap tahun.



### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Target kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah 2015 - 2019 telah berakhir pada tahun 2019. Selanjutnya target kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan yang baru dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah 2020 - 2024. Adapun realisasi dan capaian kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Militer I-02 Medan tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 8**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target	Realisasi	Capaian	Ket.	
			%	%	%	%		
			2024	2024	2024	2024		
1	Terwujudnya Proses	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90	90	100	111.11	Tercapai	

	Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel						
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	70	70	78.20	111.71	<b>Tercapai</b>
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	70	70	80.06	114.37	<b>Tercapai</b>
		d. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	94.39	104.87	<b>Tercapai</b>
<b>2</b>	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95	95	100	105.26	<b>Tercapai</b>
<b>3</b>	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80	80	100	125.00	<b>Tercapai</b>

Hasil perhitungan capaian kinerja pada tabel diatas diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari tiga sasaran strategis dalam dokumen Renstra 2020-2024, hasil capaian kinerja berupa realisasi penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-02 Medan jika dibandingkan

dengan target yang ditetapkan beberapa tahun tergolong baik. Dua indikator yang tidak berhasil disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional (Standar Mahkamah Agung Republik Indonesia).

Pengadilan Militer I-02 Medan dalam rangka pelaksanaan realisasi kinerja tahun 2023 untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, juga mengacu kepada standar target kinerja dan sasaran strategis yang hendak diwujudkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2020-2024. Perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan tahun 2024 dengan target kinerja pada Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020- 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 9**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional (Mahkamah Agung RI)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target MARI %	Target Satker %	Realisasi Satker %	Capaian Satker %	Keterangan
			2024	2024	2024	2024	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100	90	100	111.11	<b>Tercapai</b>
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	50	70	78.20	111.71	<b>Tercapai</b>
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan	50	70	80.06	114.37	<b>Tercapai</b>

		upaya hukum kasasi.					
		d. Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	80	90	94.39	104.87	<b>Tercapai</b>
<b>2</b>	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	20	95	100	105.26	<b>Tercapai</b>
		b.persentase perkara yang dilakukan melalui mediasi	25	X	X	X	X
<b>3</b>	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	80	100	125.00	<b>Tercapai</b>

Hasil perhitungan capaian kinerja pada tabel diatas diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan data pada tabel diatas hasil realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target kinerja Mahkamah Agung dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan tergolong baik dan dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam Cetak Biru Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020 – 2024.

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

### SASARAN I: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel" merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Militer I-02 Medan. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja utama. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel" pada tahun 2024 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

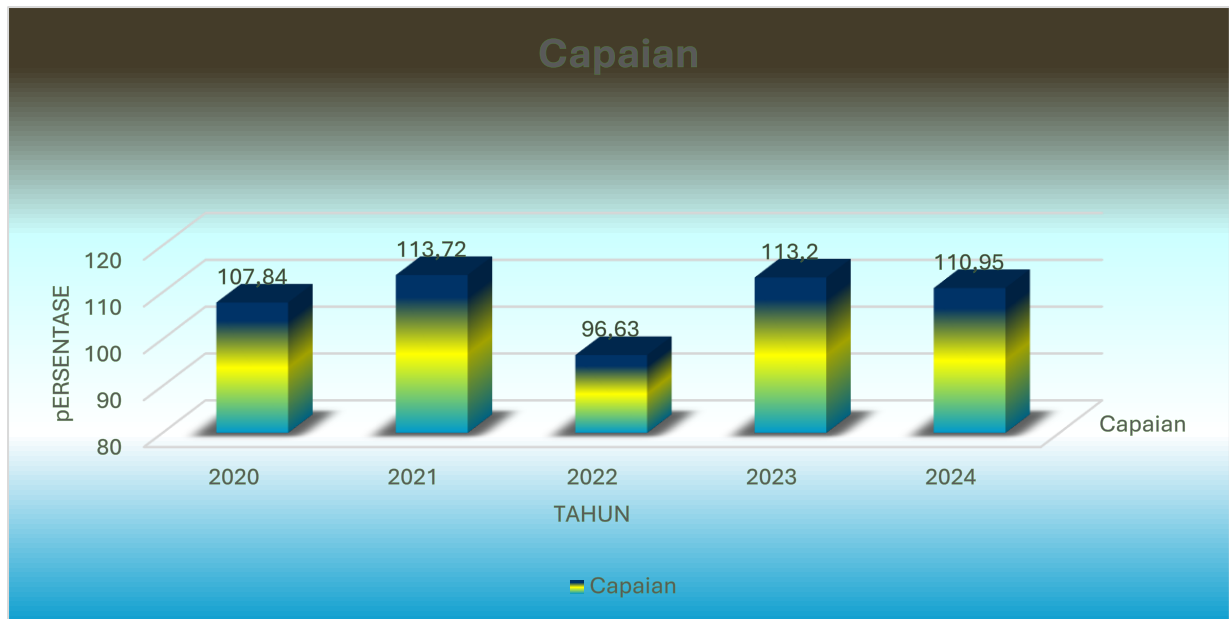
**Tabel 10**  
**Capaian Kinerja Organisasi Sasaran 1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	108.75 %	111.10 %	111.11 %	111.11%	111.11
2	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	120.95 %	135.77 %	84.11 %	108.57%	111.71
3	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	106.81 %	110.52 %	88.25 %	125.71%	114.37
4	Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	94.88 %	97.51 %	103.07 %	107.14%	104.87
<b>Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis I</b>		<b>107.84 %</b>	<b>113.72 %</b>	<b>96.63 %</b>	<b>113,20 %</b>	<b>110.51%</b>

(Sumber data LKJIP tahun 2020 sampai dengan tahun 2024)

Data pada table diatas menggambarkan capaian sasaran pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2024 capaian sasaran penyelesaian perkara sangat baik yaitu **110,95%**

**Grafik 1.**  
**Capaian Sasaran I Tahun 2020 s.d 2024 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**



Dari grafik diatas menggambarkan bahwa setiap tahun Pengadilan Militer I-02 Medan terus berupaya melakukan peningkatan produktivitas penyelesaian perkara, terbukti rentan capaian selama 4 tahun melebihi 100 %. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

**a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan ,difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Catatan:

- **SEMA** Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah waktu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA nomor 2 Tahun 2014 pada Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Perkara = Pidana/Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas.

**Tabel 11**  
**Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu:**

No	Klasifikasi perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2024	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024	Persentase
1	Pidana / Kejahatan	146	146	100 %
2	Pelanggaran lalu lintas	5	5	100 %
<b>Total</b>		151	151	100 %

**Grafik 2**  
**Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu:**



Pada tahun 2024, realisasi penyelesaian jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu mencapai target 100%. Adanya sisa perkara pada



tahun sebelumnya sering disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, dan tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Serta belum disiplinnya ketepatan penyelesaian perkara dalam waktu 5 (lima) bulan. Jumlah sisa perkara pada tahun 2023 adalah 21 Perkara. Kemudian perkara masuk 144 (seratus empat puluh empat) Perkara dan diproses selama tahun 2024 hingga terselesaikan sebagian Perkara dan menjadi tunggakan perkara tahun 2024 dengan sisa 19 (Sembilan belas) perkara.

**b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Indikator kinerja Ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

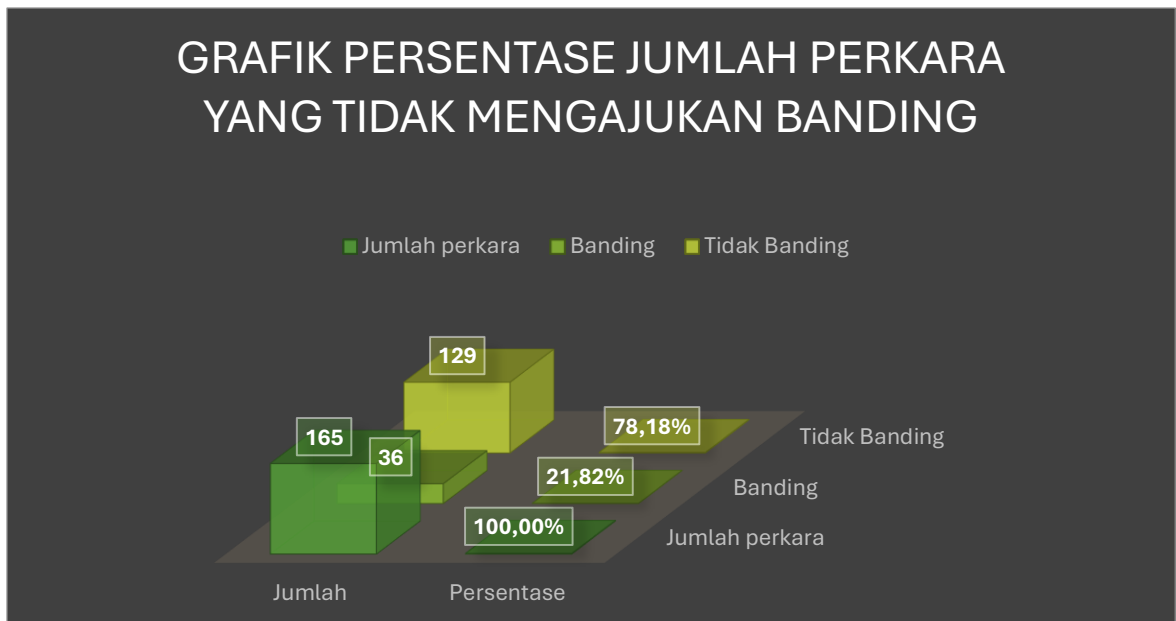
catatan:

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

**Tabel.12**  
**Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

No	Klasifikasi perkara	Jumlah perkara putus tahun 2024	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Persentase
1	Pidana / Kejahatan	146	129	78.20 %
<b>Total</b>		<b>146</b>	<b>129</b>	<b>78.20 %</b>

**Grafik 3.**  
**Capaian Sasaran Ib**  
**Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**



Secara umum, rata-rata capaian persentase yang tidak mengajukan upaya hukum banding sepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di atas. bahwa masih terdapat para pihak yang tidak puas terhadap putusan tingkat pertama Pengadilan Militer I-02 Medan, sehingga beberapa pihak mengajukan upaya hukum banding. Dari data tersebut dapat diketahui terdapat yang mengajukan upaya hukum banding sebesar 21.82 %.

**c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Indikator kinerja Ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

**Catatan:**

- Jumlah perkara yang tidak menagjukan upayah hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upayah hukum kasasi.

- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

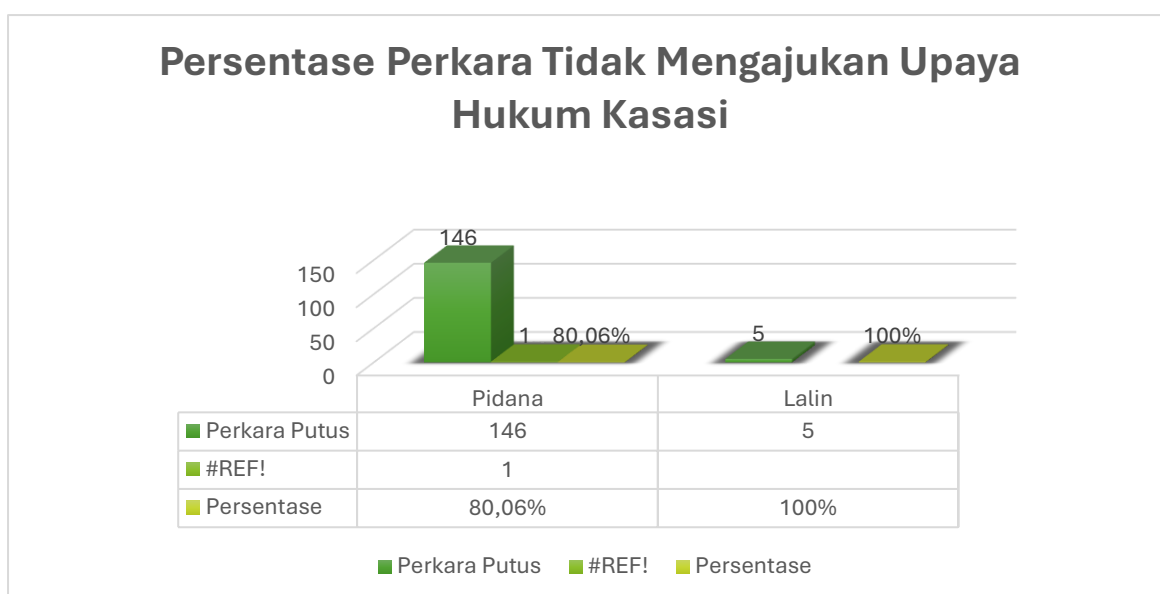
**Tabel 13.**  
**Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

No	Klasifikasi perkara	Jumlah perkara putus tahun 2024	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Persentase
1	Pidana / Kejahatan	146	133	80.60%
2	Pelanggaran lalu lintas	5	5	100%
Total				

*(sumber data : Laporan Tahunan 2024)*

Secara umum, rata-rata capaian persentase yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di atas. bahwa masih terdapat para pihak yang tidak puas terhadap putusan tingkat banding, sehingga beberapa pihak mengajukan upaya hukum Kasasi. Dari data tersebut dapat diketahui terdapat yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 16.99 %.

**Grafik 4**  
**Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**



#### **d. Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai tolak ukur kepuasan stakeholder atau masyarakat terhadap layanan yang diberikan khususnya masyarakat pencari keadilan melalui survey.

##### Indeks Kepuasan Stakeholder

Catatan:

- PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM index harus > 80.

Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.

**Tabel 14**  
**Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan**

No	Tahun	Nilai IKM
1	2020	94.88
2	2021	97.51
3	2022	97.92
4	2023	96.43
5	2024	94.39

Sejumlah fakta hukum pada umumnya menunjukkan bahwa masih adanya ketidakpercayaan masyarakat pada pengadilan, salah satunya disebabkan putusan Hakim yang dianggap belum mencerminkan nilai keadilan yang diharapkan para pencari keadilan.

**Grafik 5**  
**Capaian Sasaran 1d.**  
**Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan**



Data pada tabel dan grafik menggambarkan secara umum capaian sasaran peningkatan akseptabilitas putusan Hakim sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 cenderung stabil (capaian masih berkisar di atas 90 %) dan mencapai target yang diinginkan serta terus mengalami peningkatan. Capaian tersebut diharapkan menggambarkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan.

**SASARAN II : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

**✚ Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu**

Sasaran "Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara" dlmaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-02 Medan. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-02 Medan merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Militer I-02 Medan 2020 - 2024.

Untuk mengukur Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu dapat dilakukan dengan cara berikut.

$$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

**Catatan:**

- SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
- Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM (Penyidik Pom) dan Ankum sesuai dengan ketentuan.
- Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Papera: Perwira Penyerah Perkara.
- Odmil : Oditur Militer.
- PM : Polisi Militer.
- Ankum : Atasan Yang Berhak Menghukum.

**Tabel 15.**  
**Capaian Sasaran II Tahun 2020 s.d 2024**  
**Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Capaian Sasaran	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

Data pada tabel di atas menggambarkan capaian sasaran II pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2024, capaian sasaran penyelesaian perkara cukup baik yaitu 100 %, Yang artinya dapat disimpulkan bahwa semua salinan putusan Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu begitu juga

dengan berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

**Grafik 6**  
**Capaian Sasaran II Tahun 2020 s.d 2024**  
**Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.**



**SASARAN III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan "**Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**" dengan Indikator kinerja yaitu Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Analisa tertiadap pencapaian target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan dirensidkan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

**Catatan :**

- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

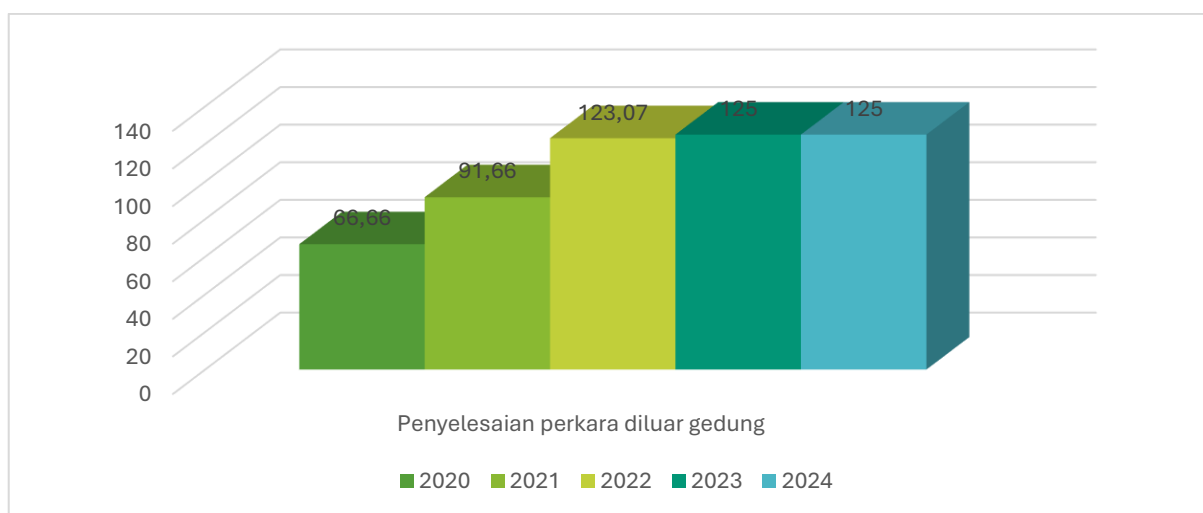
- Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara.
- Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (diresidkan).

**Tabel 16.**  
**Capaian Sasaran III Tahun 2019 s. d 2022**  
**Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	66.66	91.66	123.07	125.00	125.00
<b>Capaian Sasaran</b>	<b>66.66 %</b>	<b>91.66 %</b>	<b>123.07 %</b>	<b>125.00 %</b>	<b>125.00 %</b>

Tingkat capaian indikator kinerja prosentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan pada tahun 2024 telah memenuhi target, yaitu ditargetkan sebesar 80 % dan terealisasi sebesar 100 % dengan tingkat pencapaian sebesar 125.00 %. hal ini menunjukkan melebihi target yang telah ditetapkan bahkan diatas 100 %.

**Grafik 7**  
**Capaian Sasaran III Tahun 2020 s. d 2024**  
**Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**





Secara umum analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada tahun 2024 Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 17.**  
**Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90	100	111.11	Kedisiplinan waktu untuk melakukan persidangan dengan prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan.
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	70	78.20	111.71	Realisasi masih sedikit diatas target disebabkan masih terdapat pihak yg tidak puas dengan putusan baik terdakwa maupun pihak oditur, namun capain mencapai diatas 100 %
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	70	80.06	114.37	Realisasi sedikit diatas target disebabkan masih terdapat pihak yg tidak puas dengan putusan baik terdakwa maupun pihak oditur, namun capaian diatas 100 %
		d. Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	90	94.39	104.87	Dari 9 point survey yang diberikan terhadap stakeholder menggambarkan bahwa mereka puas terhadap pelayana Dilmil I-02 medan.

2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95	100	105.26	Kedisiplinan dalam pengiriman salinan kepada para pihak, biaya pengiriman yang tersedia.
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80	100	125.00	Keberhasilan ini tidak terlepas perencanaan waktu untuk melaksanakan sidang keliling dengan rincian target sebanyak 13 perkara, dirensidkan sebanyak 13 perkara dan berhasil putus 9 Perkara mengingat waktunya hanya 4 (empat) hari
<b>TOTAL CAPAIAN</b>					<b>112.05%</b>	



## 6. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam suatu organisasi maupun institusi. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas akan memberikan dampak dalam menggerakkan organisasi agar berjalan secara efektif dan efisien. Pendekatan pengelolaan sistem manajemen sumber daya manusia yang professional dengan mekanisme pembinaan karir yang mengedepankan pendekatan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama merupakan pendekatan pengelolaan sumber daya manusia yang digunakan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan stimulasi setiap sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitasnya dalam produktifitas dan kinerjanya. Jika system dan mekanisme ini dapat terlaksana dengan baik maka sudah semestinya akan memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi / birokrasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja layanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima (excellence service).

Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya sebagai salah satu lembaga Negara yang memiliki sumber daya manusia dimana terdiri dari tenaga teknis yang menjalankan fungsi utama dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, sedangkan kesekretariatan merupakan supporting unit mendukung bagian teknis dalam memberikan layanan utama kepada masyarakat. Kedua Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan sumber daya ini saling terkait erat dan bersinergi satu sama lain dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bagian dalam unit kerja masingmasing serta mencapai tujuan bersama yang tertuang secara umum dalam visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pembinaan dan Pengelolaan baik untuk tenaga teknis yudisial maupun tenaga nonteknis yudisial dimaksud untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan umum khususnya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada umumnya. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembinaan dan pengelolaan berikut data pegawai pada Pengadilan Militer I-02 Medan untuk menjadi kajian Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**Tabel 18**  
**Komposisi Sumber Daya Manusia**

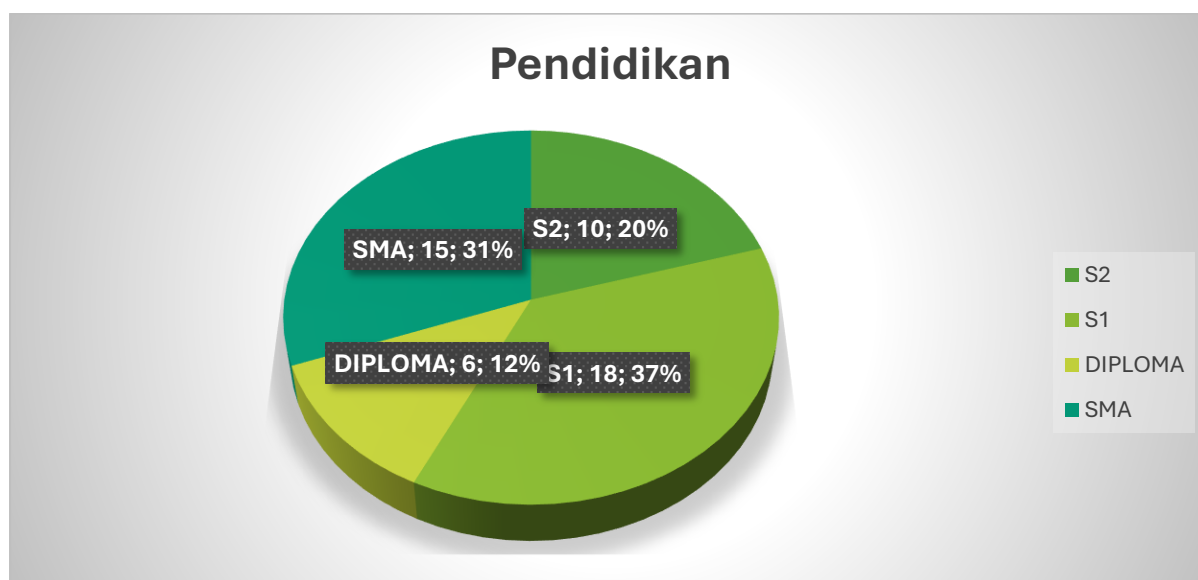
No	Nama	Jabatan	Pangkat	Gol.	Pendidikan
1	2	3	4	5	6
1.	Masykur, S.T., S.H., M.H.	Kadilmil I-02 Medan	Kolonel Chk		PASCASARJANA
1	2	3	4	5	6
2	L.M. Hutabarat, S.H., M.H.	Pokkimmil	Letnan Kolonel Chk		PASCASARJANA
3	Djuanaedi, S.H.	Pokkimmil	Letnan Kolonel Chk		STRATA I
4	Ziky Suryadi, S.H.,M.H.	Pokkimmil	Letnan KUM		PASCASARJANA
5	Indra Gunawan, S.H., M.H.	Pokkimmil	Mayor Chk		PASCASARJANA
6	Wiwid Ariyanto S., S.H.,M.H.	Pokkimmil	Mayor Chk		PASCASARJANA
7	Iskandar Zulkarnaen, S.T.,S.H.,M.H.	Pokkimmil	Mayor Chk		PASCASARJANA
8	Alex Birawah,S.H.	Pokkimmil	Mayor Chk		STRATA I
9	Slamet Purwo Widodo, S.I.P., S.H., M.H.	Pokkimmil	Kaptan Chk		PASCASARJANA

10	Nurafni, S.H	Panitera	Kapten Chk (K)		STRATA I
11	Wintar Limbong, S. Kom	Kasubbag PTIP	Penata Tk. I	III/d	STRATA I
12	Muhammad Yusuf	Kasubbag Kepegawaian	Penata Tk. I	III/d	STRATA I
13	Dessy Rahayu, SE	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata Tk. I	III/d	STRATA I
14	Miyas, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Lettu Chk		PASCASARJANA
15	Ribut Budi Santoso, SH	Panitera Pengganti	Peltu		STRATA I
16	Titim Martini,S.H.	Panitera Pengganti	Peltu		STRATA I
17	Reza Pahlepi	Panitera Pengganti	Peltu		SMA
1	2	3	4	5	6
18	Rudi	Panitera Pengganti	Pelda		SMA
19	Frisilia Pardosi, S.Sos	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Penata Muda TK I	III/b	STRATA I
20	Mahyuni,SH	Klerek - Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum Pengadilan	Penata Tk. I	III/d	STRATA I
21	Deny Faisal,SH	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Penata	III/c	STRATA I
22	Nurmansya Saragi	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran, Subbagian Umum dan Keuangan	Penata Muda TK I	III/b	SMA
23	Bobby Harianto Sinaga, S.H	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Penata Muda TK. I	III/b	STRATA I
24	Sri Ulina Ginting, S. Psi,M.Sc.	Operator - Penata Layanan Operasional,	Penata Muda TK. I	III/b	PASCASARJANA

1	2	3	4	5	6
		Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana			
<b>25</b>	Pintawati Nababan, S.H	Klerek - Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana	Penata Muda TK.I	III/b	STRATA I
<b>26</b>	Sangkot Puli, S.H., M.H.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, Sekretaris	Penata Muda TK. I	III/b	PASCASARJANA
<b>27</b>	Muhammad Hadi Wirza, SE	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan	Penata Muda	III/b	STRATA I
<b>28</b>	Seva Sontyana Limbong, Amd.Kom	Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Pengatur	II/d	DIPLOMA
<b>29</b>	Rospita Sitinjank, A.Md	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Pidana	Pengatur	II/c	DIPLOMA
<b>30</b>	Tua Parulian Siringo-ringo, A.Md	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Pidana	Pengatur	II/c	DIPLOMA
<b>31</b>	Eggi Canavari, A.Md.A.B.	Arsiparis Terampil	PPPK	VII	DIPLOMA
<b>32</b>	Yenni Sagala	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Pidana	Pelda		SMA
1	2	3	4	5	6
<b>33</b>	Parlindungan Saragih, S.H	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Pidana	Serma		STRATA I
<b>34</b>	Arif Siagian	Klerek - Pengolah Data dan	Serma		SMA

		Informasi, Subbagian Umum dan Keuangan			
<b>35</b>	Siman Silaban	Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Panitera Muda Hukum.	Serma		SMA
<b>36</b>	Hendro Bastian	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Subbagian Umum dan Keuangan.	Serka		SMA
<b>37</b>	Bramono	Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Subbagian Umum dan Keuangan.	Serka		SMA
<b>38</b>	Dede Sulaiman	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran, Panitera Muda Hukum.	Serda		SMA
<b>39</b>	Juharsah	Klerek- Pengolah Data dan Informasi, Panitera Muda Hukum.	Kopral Kepala		SMA
<b>40</b>	Irwan Saragih	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran, Panitera Muda Pidana.	Kopral Dua		SMA
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>41</b>	Budianto, ST	PPNPN	-	-	STRATA I
<b>42</b>	Razali Lubis, SE	PPNPN	-	-	STRATA I
<b>43</b>	Elda Ertika, S.H	PPNPN	-	-	STRATA I
<b>44</b>	Milfan Arief	PPNPN	-	-	SMA
<b>45</b>	Ilman Tampubolon, Amd	PPNPN	-	-	DIPLOMA
<b>46</b>	Risma Perwani	PPNPN	-	-	SMA
<b>47</b>	Prayogi	PPNPN	-	-	SMA
<b>48</b>	Marcoes Nictanov Tentero	PPNPN	-	-	SMA
<b>49</b>	Rais Martinus Kaban	PPNPN	-	-	DIPLOMA

**Grafik 8**  
**Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan**



**Tabel 19**  
**Pelatihan Yang diikuti Aparatur Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2024**

No.	Nama/Pangkat/Gol/ NRP/NIP	Kegiatan	Penyelenggaraan
1.	Romiduk Gurning, S.H. Mayor Chk / 535926	Pendidikan Seskoau	Mabes TNI
2.	L.M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk /11980001820468	Bimtek Hakim Militer Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu di Lingkungan Peradilan Militer TA. 2024	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI
3.	Wiwid Ariyanto, S., S.H., M.H. Mayor Chk/ 1080093071182	Bimtek Hakim Militer Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu di Lingkungan	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI

		Peradilan Militer TA. 2024	
<b>4.</b>	Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H. Mayor Chk/ 11080094970783	Bimtek Hakim Militer Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu di Lingkungan Peradilan Militer TA. 2024	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI
<b>5.</b>	Miyas, S.H., M.H. Lettu Chk/ 21010009620380	Bimtek Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Militer TA. 2024	Ditjen Badilmiltun
<b>6.</b>	Riza Pahlipi Peltu/ 21950302480573	Bimtek Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Militer TA. 2024	Ditjen Badilmiltun
<b>7.</b>	Titim Martini Peltu/ 21960349670477	Bimtek Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Militer TA. 2024	Ditjen Badilmiltun
<b>8.</b>	Dessy Rahayu, S.E. 1980121720060420 03	Bimtek Aplikasi SAKTI Tahun 2024 Satker Lingkup KPPN Medan II	KPPN Medan II
<b>9.</b>	Hendro Bastian Serka 21100020660791	Bimtek Aplikasi SAKTI Tahun 2024 Satker Lingkup KPPN Medan II	KPPN Medan II
<b>10.</b>	Rospita Sitinjak, A.Md. 1989090620220320 05	Bimtek Aplikasi SAKTI Tahun 2024 Satker Lingkup KPPN Medan II	KPPN Medan II



<b>11.</b>	Wiwid Ariyanto, S., S.H., M.H. Mayor Chk 1080093071182	Susjabkimmil XXV TA. 2024	Mabes TNI
<b>12.</b>	Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H. Mayor Chk 11080094970783	Susjabkimmil XXV TA. 2024	Mabes TNI
<b>13.</b>	Muhammad Hadi Wirza, S.E. 1996122220201210 04	Bimtek dan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)	Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Sumatera Utara
<b>14.</b>	Nurhafni, S.H Kapten Chk/ 21980355410479	Bimtek Kepaniteraan Dilmiltama Tahun 2024	Dilmiltama
<b>15.</b>	Yenni Sagala Pelda 21020296480384	Bimtek Kepaniteraan Dilmiltama Tahun 2024	Dilmiltama
<b>16.</b>	Masykur, S.T.,S.H.,M.H. Letkol Chk 11970020230871	Bimtek Penyelesaian Perkara Restorative Justice TA. 2024	Ditjen Badilmiltun
<b>17.</b>	Nurhafni, S.H Kapten Chk 21980355410479	Bimtek Kepaniteraan Dilmiltama Tahun 2024 Secara Daring	Ditjen Badilmiltun
<b>18.</b>	Miyas, S.H., M.H. Lettu Chk 21010009620380	Bimtek Kepaniteraan Dilmiltama Tahun 2024 Secara Daring	Ditjen Badilmiltun
<b>19.</b>	Sangkot Puli, S.H. 1986030520190310 03	Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Kepegawaian Angkatan I Secara Online Tahun 2024	BSKP Diklatkumdil
<b>20.</b>	Frisilia Vini Julianti Pardosi, S.Sos. 1990072720190320 10	Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Kepegawaian Angkatan I Secara Online Tahun 2024	BSKP Diklatkumdil

<b>21.</b>	Dessy Rahayu, S.E. 1980121720060420 03	Pelatihan Online Manajemen Pengelolaan BMN Batch Bekerjasama dengan Diklat PKN BPK	BPK
<b>22.</b>	Masykur, S.T.,S.H.,M.H. Kolonel Chk/ 11970020230871	Pelatihan Singkat Terkait Paradigma Pembaruan Hukum Pidana bagi Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Seluruh Indonesia	Ditjen Badilmiltun
<b>23.</b>	Alex Bhirawa, S.H. Mayor Chk 11090007760884	Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim Di Lingkungan Peradilan Militer Secara Daring	Ditjen Badilmiltun
<b>24.</b>	Indra Gunawan, S.H.,M.H. Mayor Chk 636671	Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim Di Lingkungan Peradilan Militer Secara Daring	Ditjen Badilmiltun
<b>25.</b>	Slamet Purwo Widodo, S. S.T.Han, S.I.P., S.H., M.H. Kapten Chk 11120029001289	Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim Di Lingkungan Peradilan Militer Secara Daring	Ditjen Badilmiltun
<b>26.</b>	Ziky Suryadi, S.H., M.H. 533176	Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim Di Lingkungan Peradilan Militer Secara Daring	Ditjen Badilmiltun

Data pada tabel diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2024 Hakim maupun Aparatur Pengadilan Militer I-02 Medan telah mengikuti beberapa pelatihan/kegiatan yang dapat meningkatkan kapabilitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada tahun 2024. Pengadilan Militer I-02 Medan dalam upaya ini pun untuk tahun berikutnya akan berusaha lebih

maksimal dalam pemanfaatan dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia sehingga diharapkan bukan saja kantor Pengadilan Militer I-02 Medan yang dapat berkembang tetapi sumber daya manusianya sendiri secara individu dapat meningkatkan kapabilitas.

## **7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan**

### **a. Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Selama periode tahun anggaran 2024, Pengadilan Militer I-02 Medan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang menunjang performa dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Mengikuti / mempersiapkan diri untuk program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang merupakan amanah dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN;
- 2) Mengikuti Program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM) yang merupakan amanah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- 3) Mengikuti / mempersiapkan diri untuk program Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang merupakan amanah dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
- 4) Menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) guna memberikan pelayanan prima dan terintegrasi bagi pencari keadilan;
- 5) Melaksanakan program Mahkamah Agung yaitu implementasi aplikasi e-Berpadu dalam rangka percepatan penyelesaian perkara Pidana

### **b. Penyebab kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Adapun faktor – faktor yang berpotensi menjadi penyebab kegagalan pencapaian kinerja pada tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Perbandingan jumlah perkara yang harus diselesaikan setiap tahunnya dengan jumlah sumber daya manusia yang ada (terutama

- Hakim) tidak ideal sehingga tidak bisa membuat dua majelis untuk percepatan sidang penyelesaian perkara, namun untuk tahun 2025 ini hal tersebut sudah bisa teratasi karena sudah ada penambahan 2 (dua) orang hakim;
- 2) Fasilitas prasarana gedung yang masih kurang memadai seperti ruang bermain anak yang dekat dengan ruang sidang utama sehingga mengganggu jalannya persidangan, Ruang arsip yang berada di lantai dua yang bebannya sangat berat dikhawatirkan mengganggu ketahanan gedung;
  - 3) Kurangnya fasilitas alat pengolah data (komputer, printer dan scanner) menyebabkan penyelesaian tugas menjadi lambat;
  - 4) Kurangnya lahan parkir yang nyaman untuk aparaturnya maupun pengunjung persidangan;
  - 5) Kurangnya anggaran pemeliharaan gedung, sehingga kurang optimalnya pemeliharaan yang dilaksanakan;
  - 6) Kurangnya sumber daya manusia yang update terhadap perkembangan teknologi informasi;
  - 7) Sulitnya menanamkan komitmen perubahan budaya kerja pada Pengadilan Militer I-02 Medan.

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2024 Pengadilan Militer I-02 Medan selaku satuan kerja memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan rincian akhir sebagai berikut:

### 1. Realisasi DIPA 663199/2024 (Badan Urusan Administrasi)

#### Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Pengadilan Militer I-02 Medan meliputi : Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Belanja Modal adalah **Rp. 5.073.965.000** dengan Realisasi **Rp. 4.875.250.581** dan persentase realisasi sebesar **96.08%**

serta sisa dana sebesar **Rp. 307.182.789** dengan persentase **7.63%**.

Rincian pagu dan realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**a. Realisasi Belanja Pegawai**

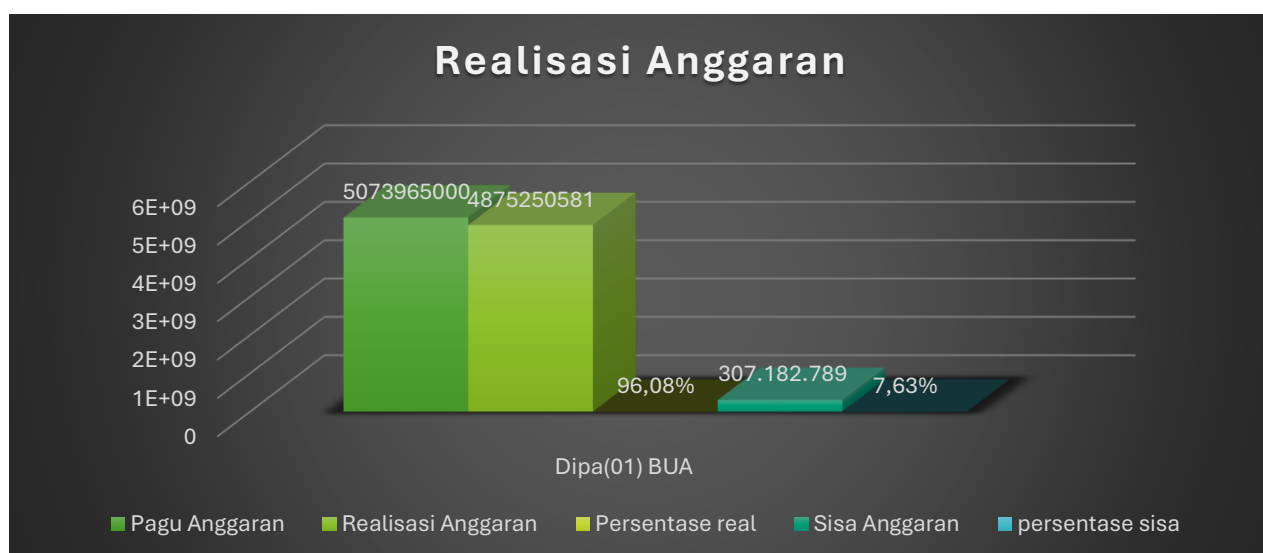
**Tabel 20.**  
**Realisasi Anggaran Dipa BUA (01)**

No	Jenis Belanja	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA				
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			(Rp)	%	(Rp)	%
<b>1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					
	Belanja Gaji Pokok PNS	788.840.000,-	699.299.700,-	88,65%	89.540.300,-	11,35 %
	Belanja Pembulatan Gaji	20.000,-	9.063,-	45,31 %	10.937,-	44,69 %
	Belanja Tunj. Suami/IStri PNS	44.500.000,-	43.918.570,-	98,69 %	581.430,-	1,31%
	Belanja Tunj. Anak PNS	11.226.000,-	10.969.942,-	97,72 %	256.058,-	2,28 %
	Belanja Tunj. Struktural PNS	45.320.000,-	34.020.000,-	75,07 %	11.300.000,-	24,93 %
	Belanja Tunj. Fungsional PNS	11.880.000,-	11.100.000,-	93,43 %	780.000,-	6,57 %
	Belanja Tunj. PPh PNS	6.671.000,-	4.732.463,-	70,94 %	1.938.537,-	29,06 %
	Belanja Tunj. Beras PNS	36.847.000,-	34.327.080,-	93,16 %	2.519.000,-	6,84 %
	Belanja Uang Makan PNS	121.000.000,-	115.426.000,-	95,39 %	5.574.000,-	4,61 %
	Belanja Tunj. Umum PNS	26.670.000,-	25.690.000,-	96,33 %	980.000,-	3,67 %
	Belanja Tunj. Fungsional TNI/Polri	2.466.561.000,-	2.419.398.871,-	98,09 %	47.162.129,-	1,81 %
	Belanja Gaji Pokok PPPK	40.570.000,-	40.023.2000,-	98,65 %	546.800,-	1,35 %
	Belanja Pembulatan Gaji PPK	9000,-	1.220,-	13,56 %	7.780,-	86,44 %
	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3.704.000,-	0,-	0%	3.704.000,-	100%
	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.480.000,-	0,-	0%	1.480.000,-	100%
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.900.000,-	4.900.000,-	100 %	0,-	0%
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.054.000,-	1.013.880,-	25,01 %	3.040.120-	74,99 %
	Belanja Uang Makan PPPK	8.400.000,-	8.225.000,-	97,92 %	175.000,-	2,18 %
	<b>TOTAL</b>	<b>3.622.752.000,-</b>	<b>3.453.054.989,-</b>	<b>95,32%</b>	<b>169.697.011,-</b>	<b>4,68 %</b>

## b. Realisasi Belanja Operasional

No	Jenis Belanja	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA				
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran (Rp)	
			(Rp)	%	(Rp)	%
<b>2.</b>	<b>Belanja Operasional</b>					
	Kebutuhan Sehari - Hari Perkantoran	457.909.000,-	456.549.028,-	97,70 %	1.359.972,-	2,3 %
	Langganan Daya dan Jasa	216.509.000,-	215.713.801,-	99,63 %	795.199,-	0,37 %
	Pemeliharaan Perkantoran	390.405.000,-	384.814.543,-	98,57 %	5.590.457,-	1,47 %
	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Perkantoran	85.148.000,-	85.148.000,-	100 %	0,-	0 %
	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim dan Hakim AdHoc	152.000.000,-	135.360.000,-	89,05 %	16.640.000,-	10,95 %
	Konsultasi Ke Pusat/ Tingkat Banding	70.200.000,-	66.118.348,-	94,19 %	4.081.652,-	5,81 %
	Konsultasi Ke KPPN/KANWIL/KP KNL	1.200.000,-	1.050.000,-	87,50 %	150.000,-	12,50 %
	<b>TOTAL</b>	<b>1.317.371.000,-</b>	<b>1.344.753.720,-</b>	<b>97,92 %</b>	<b>28.617.280,-</b>	<b>2,08 %</b>

**Grafik 9**  
**Realisasi Anggaran DIPA 01**



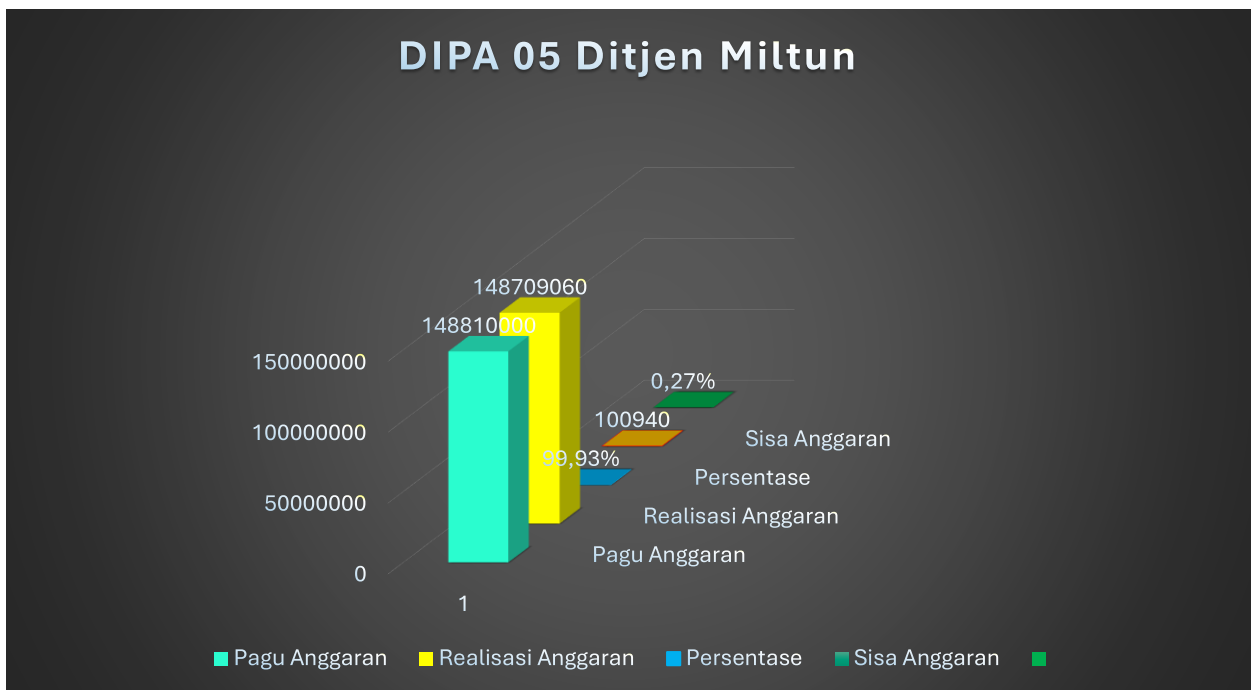
## 2. Realisasi DIPA (05) Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

DIPA (05) Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara : Anggaran DIPA (05) sebesar Rp. 151.058.000,- (Seratus lima puluh satu juta lima puluh delapan ribu rupiah), yang meliputi: belanja barang pada DIPA (05) Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

**Tabel 21.**  
**Realisasi Anggaran DIPA Ditjen (05)**

NO	Satker	Belanja Barang (05)				
		Pagu DIPA (663200) RP	Realisasi/Pelaksanaan		Sisa sd saat ini	
			RP	%	Rp	%
1.	Dilmil I-02 Medan	148.810.000,-	148.709.060,-	99,93	100.940,-	0,27

**Grafik 10**  
**Realisasi Anggaran DIPA 05**



Dari tabel realisasi anggaran dipa 01 maupun dipa 05 terlihat bahwa penyerapan anggaran tahun anggaran 2024 dapat diserap dengan maksimal namun masih terdapat sisa anggaran untuk dipa 01 (BUA) sebesar Rp. 307.182.789,- dan Dipa 05 (DITJEN BADILMILTUN) sebesar Rp. 100.940,- hal ini diharapkan tidak menjadi mempengaruhi pagu anggaran yang akan diberikan kepa satker Pengadilan Militer I-02 Medan pada tahun-tahun berikutnya karena secara keseluruhan penyerapan anggara DIPA 01 dan 05 tahun 2024 Pengadilan Militer I-02 Medan diatas 90 %.





## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer I-02 Tahun 2024 menyajikan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 6 (enam) indikator kinerja. Secara umum, sasaran strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh Pengadilan Militer I-02 Medan. Hal ini terlihat dari 6 indikator kinerja yang diperjanjikan, semua indikator kinerja sesuai dengan target, bahkan ada yang melampaui target dan memperoleh capaian > 100%. Namun masih ada sisa perkara yang belum bisa diputus pada tahun 2024, dan menjadi sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun 2025.

Capaian sasaran pada tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas Pengadilan Militer I-02 Medan sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Walaupun ada realisasi indikator menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain : adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang. Sedangkan faktor utama yang menyebabkan masih terdapat sisa perkara adalah karena peningkatan jumlah perkara yang masuk pada akhir tahun yang sulit diprediksi sehingga mengakibatkan peningkatan sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya.

### B. SARAN

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Militer I-02 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya:

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparaturnya peradilan, masyarakat, dan civil society sebagai bahan integral dari pengadilan.
- Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
- Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
- Penguatan pengawasan internal dan eksternal
- Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.
- Untuk lebih meningkatkan keberhasilan fungsi dan tugas pokok Peradilan Militer dan TUN dimasa mendatang, maka dimohon kiranya Mahkamah Agung RI untuk dapat meningkatkan anggaran DIPA diantaranya anggaran operasional Kantor, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung, dan belanja modal untuk menunjang fasilitas pada Pengadilan Militer I-02 Medan.
- Untuk peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para personil/pegawai Peradilan Militer dan TUN, maka dimohonkan pada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara terus-menerus dapat mengadakan pelatihan baik dibidang teknis maupun non teknis yang lebih khusus pengembangan bidang IT.
- Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sehingga ada persamaan persepsi penyusunannya.

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN III**

**SK TIM**

**PENYUSUN LKjIP**



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN  
Nomor : W1-Mil02/22/KPM/KEP/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2024 PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Militer I-02 Medan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

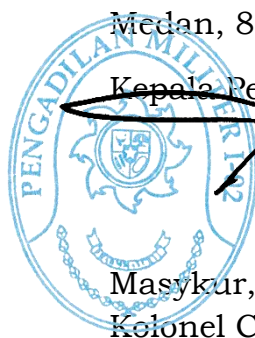
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022 PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Militer I-02 Medan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Medan, 8 Januari 2025

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan



Masykur, S.T., S.H., M.H.

Kolonel Chk 11970020230871

LAMPIRAN I KEPUTUSAN

Nomor : W1-Mil02/22/KPM/KEP/I/2025

Tanggal : 8 Januari 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2024 PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Kolonel Chk Masykur, S.T.,S.H.,M.H.
2	Koordinasi Validasi Data	Letkol Sus Ziky Suryadi, S.H.,M.H.
3	Ketua	Kapten Nurhafni, S.H.
4	Sekretariat	Wintar Limbong, S.Kom.
5	Anggota	1. Staf Subbag Umum Keuangan 2. Staf Subbag Kepegawaian 3. Staf Subbag PTIP 4. Staf Subbag Kepaniteraan
6	Tim Reviu Laporan Kinerja	Mayor Chk Wiwid Aryanto, S.H.,M.H.

Medan, 8 Januari 2025

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan



Masykur, S.T.,S.H.,M.H.

Kolonel Chk 11970020230871

# LAMPIRAN IV

## Daftar Penghargaan Tahun 2024



## 1. DAFTAR PENGHARGAAN PENGADILAN MILITER I-02 TAHUN 2024

1. Pengadilan Militer I-02 Medan meraih penghargaan sebagai juara 3 Video Profile di lingkungan Peradilan Militer yang diselenggarakan Dirjen Badilmiltun MARI



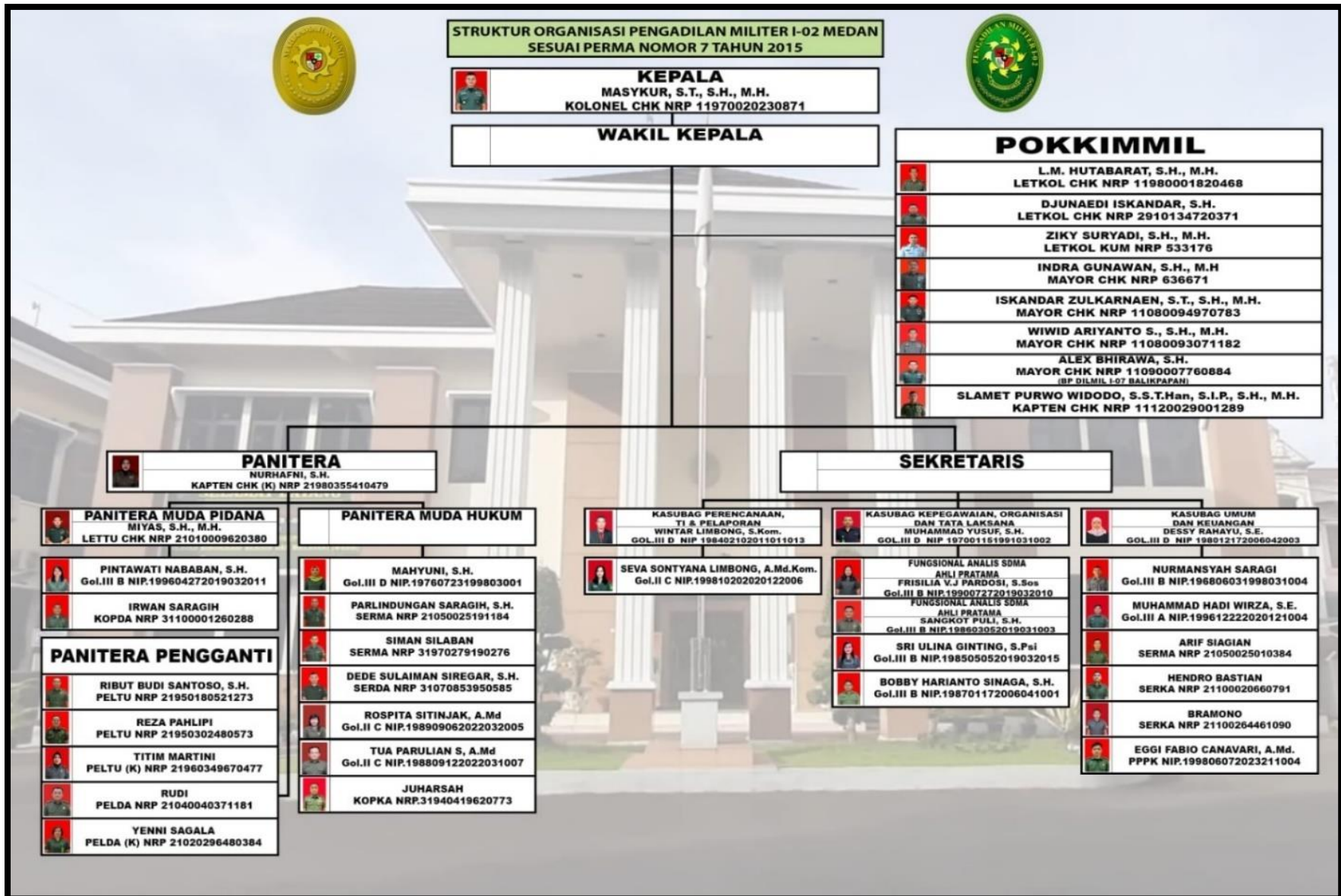
2. Penghargaan dalam menindaklanjuti secara cepat dan baik dalam proses penyelesaian perkara pidana secara elektronik melalui aplikasi e\_berpadu



# LAMPIRAN V

## Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-02 Medan

**STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER I-02 TAHUN 2024**  
(Perma No. 7 Tahun 2015)



# LAMPIRAN VI

## Indikator Kinerja Utama

### 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	<b>Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>SEMA</b> Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan</li> <li>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah waktu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA nomor 2 Tahun 2014 pada Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>Perkara = Pidana/Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>• Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama.</li> </ul>		
		d. Indeks Persepsi <i>Stakeholder</i> yang puas terhadap layanan Peradilan	<p style="text-align: center;">Indeks Kepuasan Stakeholder</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>• Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM index harus &gt; 80.</li> <li>• Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.</li> </ul>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.	$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM (Penyidik Pom) dan Ankum sesuai dengan ketentuan.</li> <li>• Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>• Papera: Perwira Penyerah Perkara.</li> <li>• Odmil : Oditur Militer.</li> <li>• PM : Polisi Militer.</li> <li>• Ankum : Atasan Yang Berhak Menghukum.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan dirensidkan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara.</li> <li>• Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan).</li> </ul>	panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	--	----------	-------------------------------------

# LAMPIRAN VII

## Rencana Kinerja Tahun 2024



#### 4. RENCANA KINERJA TAHUN 2024 DAN PROGRAM ANGGARAN 2024

No	Sasaran / Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90 %
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	70 %
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	70 %
		d. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80 %
4	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	98 %
		Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98 %
		Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.	97 %

**4. PROGRAM ANGGARAN 2024**  
**PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
<b>1</b>	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 5.073.965.000
<b>2</b>	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Rp. 148.810.000
<b>Total</b>		<b>Rp. 5.222.775.000</b>

# LAMPIRAN VIII

## Perjanjian Kinerja Tahun 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kolonel Chk Masykur, S.T., S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Pengadilan Militer I - 02 Medan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Laksamana Pertama TNI Tuty Kiptiani, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi - I Medan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 8 Januari 2024

Pihak Pertama,

Masykur, S.T., S.H., M.H.  
Kolonel Chk 11970020230871

Pihak Kedua,

Tuty Kiptiani S.H., M.H.  
Laksamana Pertama TNI

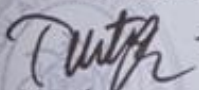
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

No	Sasaran / Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. d. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90 %  70 %  70 %  90 %
2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80 %
4	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang tertib administrasi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Persentase terselesaikannya urusan perencanaan program dan anggaran, Teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.	98 %
		Persentase terselesaikannya pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana.	98 %
		Persentase terselesaikannya urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.	97 %

	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (01)	Rp.	4.330.383.000,-

2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (05)	Rp.	148.810.000,-
<b>Total Dipa 01 dan 05</b>		<b>Rp</b>	<b>4.479.193.000,-</b>

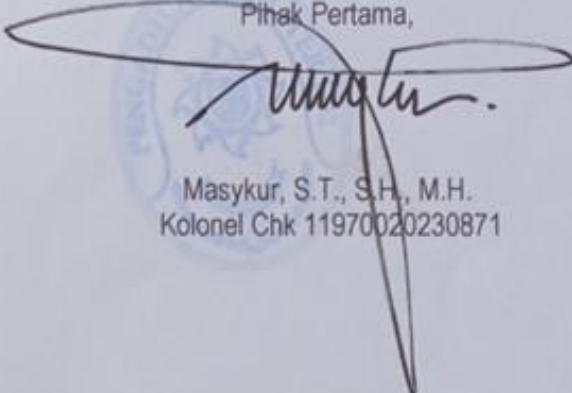
Pihak Kedua,



Tuty Kiptiani S.H., M.H.  
Laksamana Pertama TNI

Medan, 8 Januari 2024

Pihak Pertama,



Masykur, S.T., S.H., M.H.  
Kolonel Chk 11970020230871

PERJANJIAN KINERJA  
TAHUNAN  
TAHUN 2025

Pengadilan Militer I - 02 Medan



Pengadilan Militer I - 02 Medan  
Jl. Ngumban Surbakti No. 45 Medan  
Telp. 061-80047001; 061-80047002 Fax. 061-80047002  
Medan - Sumatera Utara 20131  
e-mail : dilmil102mdn@gmail.com

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kolonel Chk Masykur, S.T., S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Pengadilan Militer I - 02 Medan

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : Laksamana Pertama TNI Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi - I Medan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

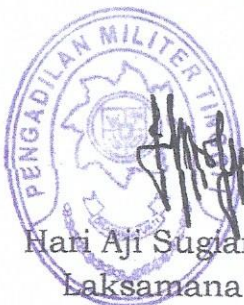
**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.  
Laksamana Pertama TNI



Masykur, S.T., S.H., M.H.  
Kolonel Chk 11970020230871



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

No	Sasaran / Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. d. Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan	80 %  70 % 70 %  90 %
2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80 %
4	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	98 %
		Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan	98 %

	pelaksanaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana	urusan penataan dan tata laksana	
	Persentase pelaksanaan menyurat, perlengkapan, keamanan, hubungan perpustakaan pengelolaan keuangan.	penyelesaian urusan surat arsip, rumah tangga, keprotokolan, masyarakat, serta	95 %

	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (01)	Rp.	4.733.102.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (05)	Rp.	235.552.000,-
<b>Total Dipa 01 dan 05</b>		<b>Rp</b>	<b>4.968.654.000,-</b>

Medan, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.  
Laksamana Pertama TNI



Masykur, S.T., S.H., M.H.  
Kolonel Chk 11970020230871

# LAMPIRAN IX

## Matriks RENSTRA 2024

## 5. MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

### Matrik Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 Pengadilan Militer I-02 Medan

**Visi : TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN YANG AGUNG**

**Misi : 1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

**2. MENINGKATKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN**

**3. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN, PROFESIONALISME, TENAGA TEKNIS DAN NON TEKNIS PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

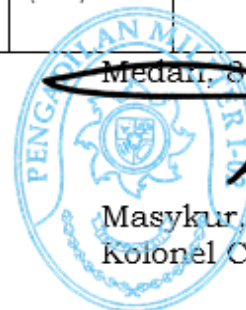
**4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	97 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	80 %	85 %	90 %	90%	90 %	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)  b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung  c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer  Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi  Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama yang tepat waktu	865 pkr	22.077.249.000

		h. <u>Presentase</u> perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.			b. <u>resentase</u> perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	80 %	85 %	90 %	70 %	70 %	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)  b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung  c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer  Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi  Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			
		a. <u>Presentase</u> perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.			c. <u>resentase</u> perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	80 %	85 %	90 %	70 %	70 %	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)  b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer  Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi  Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			

											c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung				
		b. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95 %		d. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95%	95%	95%	90%	90%	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer			
2	Tersampainya salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	100 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			
3	Tercapainya akses peradilan bagi masyarakat kurang mampu	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	97 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	80 %	85 %		80 %	80%	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer			

Medan, 8 Januari 2024



Masykur, S.T., S.H., M.H.  
Kolonel Chk 11970020230871

# LAMPIRAN X

## Pengukuran Kinerja

## 6. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

### PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

TAHUN 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	KEGIATAN / UPAYA / STRATEGI / KENDALA / SOLUSI YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90	100	111.11	Kedisiplinan waktu untuk melakukan persidangan dengan prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan.
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	70	78.20	111.71	Realisasi masih sedikit diatas target disebabkan masih terdapat pihak yg tidak puas dengan putusan baik terdakwa maupun pihak oditur, namun capain mencapai diatas 100 %
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	70	80.06	114.37	Realisasi sedikit diatas target disebabkan masih terdapat pihak yg tidak puas dengan putusan baik terdakwa maupun pihak oditur, namun capaian diatas 100 %
		d. Indeks persepsi Stakeholder yang	90	94.39	104.87	Dari 9 point survey yang diberikan terhadap



		puas terhadap layanan peradilan				stakeholder menggambarkan bahwa mereka puas terhadap pelayanan Dilmil I-02 medan.
2	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95	100	105.26	Kedisiplinan dalam pengiriman salinan kepada para pihak, biaya pengiriman yang tersedia.
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80 %	100	125.00	Keberhasilan ini tidak terlepas perencanaan waktu untuk melaksanakan sidang keliling dengan rincian target sebanyak 13 perkara, dirensidkan sebanyak 13 perkara dan berhasil putus 9 Perkara mengingat waktunya hanya 4 (empat) hari
<b>TOTAL CAPAIAN</b>					<b>112.05%</b>	



# LAMPIRAN XI

## Laporan Realisasi Anggaran

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 005 **MAHKAMAH AGUNG**  
**Unit Organisasi** : 05 **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**Satuan Kerja** : 663200 **PENGADILAN MILITER I - 02 DI MEDAN**

Hal 1 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>148,810,000</b>	<b>0</b>	<b>141,438,345</b>	<b>7,270,715</b>	<b>148,709,060</b>	<b>99.93 %</b>	<b>100,940</b>
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	148,810,000	0	141,438,345	7,270,715	148,709,060	99.93 %	100,940
BF.1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	148,810,000	0	141,438,345	7,270,715	148,709,060	99.93 %	100,940
<b>BCA Perkara Hukum Perseorangan</b>	<b>78,810,000</b>	<b>0</b>	<b>71,438,345</b>	<b>7,270,715</b>	<b>78,709,060</b>	<b>99.87 %</b>	<b>100,940</b>
BCA.U03 Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	78,250,000	0	70,982,405	7,219,215	78,201,620	99.94 %	48,380
051 Pendaftaran Berkas Perkara	19,000,000	0	18,016,500	983,000	18,999,500	100.00	500
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	19,000,000	0	18,016,500	983,000	18,999,500	100.00	500
521211 Belanja Bahan	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	100.00	0
000006. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	11,500,000	0	10,516,500	983,000	11,499,500	100.00	500
000007. Alat Tulis Kantor	11,500,000	0	10,516,500	983,000	11,499,500	100.00	500
052 Penetapan Hari Sidang	325,000	0	211,040	88,500	299,540	92.17 %	25,460
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	325,000	0	211,040	88,500	299,540	92.17 %	25,460
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	325,000	0	211,040	88,500	299,540	92.17 %	25,460
000008. Pengiriman Penetapan Hari Sidang (Rensid)	325,000	0	211,040	88,500	299,540	92.17 %	25,460
053 Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	29,550,000	0	27,476,760	2,069,500	29,546,260	99.99 %	3,740
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	29,550,000	0	27,476,760	2,069,500	29,546,260	99.99 %	3,740
521211 Belanja Bahan	19,550,000	0	18,826,760	719,500	19,546,260	99.98 %	3,740
000009. Konsumsi Makan Pengamanan dari POM	2,500,000	0	2,340,100	158,800	2,498,900	99.96 %	1,100
000010. Konsumsi Makan Terdakwa	6,250,000	0	5,738,700	510,700	6,249,400	99.99 %	600
000011. Konsumsi Makan Persidangan di Luar Jam Kerja (Mejelis Hakim, Panitera, Provost, Terdakwa dan 2 Orang Saksi)	10,800,000	0	10,747,960	50,000	10,797,960	99.98 %	2,040
522151 Belanja Jasa Profesi	6,400,000	0	6,400,000	0	6,400,000	100.00	0
000012. Honorarium saksi Ahli	6,400,000	0	6,400,000	0	6,400,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000	0	2,250,000	1,350,000	3,600,000	100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG**  
**Unit Organisasi : 05 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**Satuan Kerja : 663200 PENGADILAN MILITER I - 02 DI MEDAN**

Hal 2 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000013. Pemeriksaan Barang Bukti di Luar Ruang Sidang	3,600,000	0	2,250,000	1,350,000	3,600,000	100.00	0
<b>054 Minutasi/Upaya Hukum</b>	<b>7,500,000</b>	<b>0</b>	<b>7,500,000</b>	<b>0</b>	<b>7,500,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
054.0A TANPA SUB KOMPONEN	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	100.00	0
000014. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	100.00	0
<b>055 Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara</b>	<b>21,875,000</b>	<b>0</b>	<b>17,778,105</b>	<b>4,078,215</b>	<b>21,856,320</b>	<b>99.91 %</b>	<b>18,680</b>
055.0A TANPA SUB KOMPONEN	21,875,000	0	17,778,105	4,078,215	21,856,320	99.91 %	18,680
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	21,875,000	0	17,778,105	4,078,215	21,856,320	99.91 %	18,680
000015. Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara	21,875,000	0	17,778,105	4,078,215	21,856,320	99.91 %	18,680
<b>BCA.U05 Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18</b>	<b>560,000</b>	<b>0</b>	<b>455,940</b>	<b>51,500</b>	<b>507,440</b>	<b>90.61 %</b>	<b>52,560</b>
<b>051 Pendaftaran Berkas Perkara</b>	<b>210,000</b>	<b>0</b>	<b>210,000</b>	<b>0</b>	<b>210,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	210,000	0	210,000	0	210,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	60,000	0	60,000	0	60,000	100.00	0
000001. Penggandaan dan Penjilidan Berkas perkara	60,000	0	60,000	0	60,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
000002. Alat Tulis Kantor	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
<b>052 Penetapan Hari Sidang</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>51,500</b>	<b>91,500</b>	<b>91.50 %</b>	<b>8,500</b>
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	100,000	0	40,000	51,500	91,500	91.50 %	8,500
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	100,000	0	40,000	51,500	91,500	91.50 %	8,500
000003. Pengiriman Penetapan Hari Sidang	100,000	0	40,000	51,500	91,500	91.50 %	8,500
<b>053 Minutasi</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	100,000	0	100,000	0	100,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	100,000	0	100,000	0	100,000	100.00	0
000004. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	100,000	0	100,000	0	100,000	100.00	0
<b>054 Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>105,940</b>	<b>0</b>	<b>105,940</b>	<b>70.63 %</b>	<b>44,060</b>
054.0A TANPA SUB KOMPONEN	150,000	0	105,940	0	105,940	70.63 %	44,060

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 005 MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Organisasi** : 05 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
**Satuan Kerja** : 663200 PENGADILAN MILITER I - 02 DI MEDAN

Hal 3 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	150,000	0	105,940	0	105,940	70.63 %	44,060
000005. Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara ke Papera, Ankum, Otmil dan POM	150,000	0	105,940	0	105,940	70.63 %	44,060
<b>QCA Perkara Hukum Perseorangan</b>	<b>70,000,000</b>	<b>0</b>	<b>70,000,000</b>	<b>0</b>	<b>70,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
<b>QCA.001 Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan     Militer</b>	<b>70,000,000</b>	<b>0</b>	<b>70,000,000</b>	<b>0</b>	<b>70,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
<b>051 Sidang di Luar Gedung Pengadilan</b>	<b>70,000,000</b>	<b>0</b>	<b>70,000,000</b>	<b>0</b>	<b>70,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
051.0A SIDANG KELILING	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000016. Biaya Uang Kebersihan	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	69,600,000	0	69,600,000	0	69,600,000	100.00	0
000017. Tiket	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	100.00	0
000018. Penginapan	26,700,000	0	26,700,000	0	26,700,000	100.00	0
000019. Uang Harian	39,600,000	0	39,600,000	0	39,600,000	100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 005 MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Organisasi** : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
**Satuan Kerja** : 663199 PENGADILAN MILITER I - 02 DI MEDAN

Hal 1 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>5,073,965,000</b>	<b>0</b>	<b>4,337,134,999</b>	<b>538,115,582</b>	<b>4,875,250,581</b>	<b>96.08 %</b>	<b>198,714,419</b>
WA Program Dukungan Manajemen	5,073,965,000	0	4,337,134,999	538,115,582	4,875,250,581	96.08 %	198,714,419
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	67,982,000	0	0	67,691,872	67,691,872	99.57 %	290,128
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	67,982,000	0	0	67,691,872	67,691,872	99.57 %	290,128
EBB.951 Layanan Sarana Internal	67,982,000	0	0	67,691,872	67,691,872	99.57 %	290,128
052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	17,982,000	0	0	17,791,872	17,791,872	98.94 %	190,128
052.0A PENGADAAN PERANGKAT DATA	17,982,000	0	0	17,791,872	17,791,872	98.94 %	190,128
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17,982,000	0	0	17,791,872	17,791,872	98.94 %	190,128
000103. PRINTER	4,218,000	0	0	4,218,000	4,218,000	100.00	0
000104. SCANNER	13,764,000	0	0	13,573,872	13,573,872	98.62 %	190,128
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	50,000,000	0	0	49,900,000	49,900,000	99.80 %	100,000
053.0A PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN	50,000,000	0	0	49,900,000	49,900,000	99.80 %	100,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50,000,000	0	0	49,900,000	49,900,000	99.80 %	100,000
000105. VERTICAL BLIND	50,000,000	0	0	49,900,000	49,900,000	99.80 %	100,000
WA.6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	5,005,983,000	0	4,337,134,999	470,423,710	4,807,558,709	96.04 %	198,424,291
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,005,983,000	0	4,337,134,999	470,423,710	4,807,558,709	96.04 %	198,424,291
EBA.962 Layanan Umum	9,860,000	0	9,750,000	0	9,750,000	98.88 %	110,000
051 Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	9,860,000	0	9,750,000	0	9,750,000	98.88 %	110,000
051.0A P4GN	9,860,000	0	9,750,000	0	9,750,000	98.88 %	110,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9,860,000	0	9,750,000	0	9,750,000	98.88 %	110,000
000097. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	9,860,000	0	9,750,000	0	9,750,000	98.88 %	110,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	4,996,123,000	0	4,327,384,999	470,423,710	4,797,808,709	96.03 %	198,314,291
001 Gaji dan Tunjangan	3,622,752,000	0	3,096,020,053	357,034,936	3,453,054,989	95.32 %	169,697,011
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	3,622,752,000	0	3,096,020,053	357,034,936	3,453,054,989	95.32 %	169,697,011
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	788,840,000	0	647,251,300	52,048,400	699,299,700	88.65 %	89,540,300

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 005 MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Organisasi** : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
**Satuan Kerja** : 663199 PENGADILAN MILITER I - 02 DI MEDAN

Hal 2 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000001. Tambahan Kenaikan Gaji	7,188,000	0	7,187,800	0	7,187,800	100.00	200
000002. Belanja Gaji Pokok PNS	684,135,000	0	542,578,000	52,048,400	594,626,400	86.92 %	89,508,600
000003. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	48,960,000	0	48,959,100	0	48,959,100	100.00	900
000004. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	48,557,000	0	48,526,400	0	48,526,400	99.94 %	30,600
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,000	0	8,495	568	9,063	45.31 %	10,937
000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS	16,000	0	6,831	568	7,399	46.24 %	8,601
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	2,000	0	800	0	800	40.00 %	1,200
000007. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	2,000	0	864	0	864	43.20 %	1,136
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	44,500,000	0	40,626,610	3,291,960	43,918,570	98.69 %	581,430
000008. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	38,450,000	0	34,660,660	3,291,960	37,952,620	98.71 %	497,380
000009. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	3,050,000	0	3,004,610	0	3,004,610	98.51 %	45,390
000010. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	3,000,000	0	2,961,340	0	2,961,340	98.71 %	38,660
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	11,226,000	0	10,183,912	786,030	10,969,942	97.72 %	256,058
000011. Belanja Tunj. Anak PNS	9,650,000	0	8,621,646	786,030	9,407,676	97.49 %	242,324
000012. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	788,000	0	786,030	0	786,030	99.75 %	1,970
000013. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	788,000	0	776,236	0	776,236	98.51 %	11,764
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	45,320,000	0	32,400,000	1,620,000	34,020,000	75.07 %	11,300,000
000014. Belanja Tunjangan Struktural PNS	39,560,000	0	26,640,000	1,620,000	28,260,000	71.44 %	11,300,000
000015. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	100.00	0
000016. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	11,880,000	0	10,020,000	1,080,000	11,100,000	93.43 %	780,000
000017. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10,800,000	0	8,940,000	1,080,000	10,020,000	92.78 %	780,000
000018. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji Ke 13)	540,000	0	540,000	0	540,000	100.00	0
000019. Bedanja Tunjangan Fungsional (Gaji ke 14)	540,000	0	540,000	0	540,000	100.00	0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	6,671,000	0	4,732,463	0	4,732,463	70.94 %	1,938,537
000020. Belanja Tunjangan PPh PNS	1,427,000	0	455,960	0	455,960	31.95 %	971,040

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 005 MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Organisasi** : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
**Satuan Kerja** : 663199 PENGADILAN MILITER I - 02 DI MEDAN

Hal 3 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000021. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	2,622,000	0	1,874,646	0	1,874,646	71.50 %	747,354
000022. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	2,622,000	0	2,401,857	0	2,401,857	91.60 %	220,143
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	36,847,000	0	31,792,380	2,534,700	34,327,080	93.16 %	2,519,920
000023. Belanja Tunj Beras PNS	36,847,000	0	31,792,380	2,534,700	34,327,080	93.16 %	2,519,920
511129 Belanja Uang Makan PNS	121,000,000	0	104,668,000	10,758,000	115,426,000	95.39 %	5,574,000
000024. Belanja Uang Makan PNS	121,000,000	0	104,668,000	10,758,000	115,426,000	95.39 %	5,574,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	26,670,000	0	23,855,000	1,835,000	25,690,000	96.33 %	980,000
000025. Belanja Tunjangan Umum PNS	23,000,000	0	20,185,000	1,835,000	22,020,000	95.74 %	980,000
000026. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1,835,000	0	1,835,000	0	1,835,000	100.00	0
000027. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1,835,000	0	1,835,000	0	1,835,000	100.00	0
511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	2,466,561,000	0	2,140,299,893	279,098,978	2,419,398,871	98.09 %	47,162,129
000028. Belanja Tunjangan Fungsional TNI/POLRI	2,466,561,000	0	2,140,299,893	279,098,978	2,419,398,871	98.09 %	47,162,129
511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
000029. Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	40,570,000	0	37,164,400	2,858,800	40,023,200	98.65 %	546,800
000030. Belanja Gaji Pokok PPPK	34,776,000	0	31,446,800	2,858,800	34,305,600	98.65 %	470,400
000031. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	2,897,000	0	2,858,800	0	2,858,800	98.68 %	38,200
000032. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	2,897,000	0	2,858,800	0	2,858,800	98.68 %	38,200
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9,000	0	1,140	80	1,220	13.56 %	7,780
000033. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,000	0	980	80	1,060	15.14 %	5,940
000034. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1,000	0	80	0	80	8.00 %	920
000035. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1,000	0	80	0	80	8.00 %	920
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,704,000	0	0	0	0	0.00 %	3,704,000
000036. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,176,000	0	0	0	0	0.00 %	3,176,000
000037. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 13)	264,000	0	0	0	0	0.00 %	264,000
000038. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 14)	264,000	0	0	0	0	0.00 %	264,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 005 MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Organisasi** : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
**Satuan Kerja** : 663199 PENGADILAN MILITER I - 02 DI MEDAN

Hal 4 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,480,000	0	0	0	0	0.00 %	1,480,000
000039. Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,270,000	0	0	0	0	0.00 %	1,270,000
000040. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13)	105,000	0	0	0	0	0.00 %	105,000
000041. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	105,000	0	0	0	0	0.00 %	105,000
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,900,000	0	4,550,000	350,000	4,900,000	100.00	0
000042. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,200,000	0	3,850,000	350,000	4,200,000	100.00	0
000043. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13)	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00	0
000044. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00	0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,054,000	0	941,460	72,420	1,013,880	25.01 %	3,040,120
000045. Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,476,000	0	796,620	72,420	869,040	25.00 %	2,606,960
000046. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13)	289,000	0	72,420	0	72,420	25.06 %	216,580
000047. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14)	289,000	0	72,420	0	72,420	25.06 %	216,580
511628 Belanja Uang Makan PPPK	8,400,000	0	7,525,000	700,000	8,225,000	97.92 %	175,000
000048. Belanja Uang Makan PPPK	8,400,000	0	7,525,000	700,000	8,225,000	97.92 %	175,000
<b>002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>1,373,371,000</b>	<b>0</b>	<b>1,231,364,946</b>	<b>113,388,774</b>	<b>1,344,753,720</b>	<b>97.92 %</b>	<b>28,617,280</b>
002.0A KEBUTUHAN SEHARI HARI PERKANTORAN	457,909,000	0	397,054,428	59,494,600	456,549,028	99.70 %	1,359,972
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	375,489,000	0	320,511,650	53,991,600	374,503,250	99.74 %	985,750
000049. Pengemudi	36,300,000	0	30,250,000	6,050,000	36,300,000	100.00	0
000050. THR Pengemudi	3,025,000	0	3,025,000	0	3,025,000	100.00	0
000051. Pramubakti	132,000,000	0	110,000,000	22,000,000	132,000,000	100.00	0
000052. THR Pramubakit	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	100.00	0
000053. Satpam	145,200,000	0	121,000,000	24,200,000	145,200,000	100.00	0
000054. THR Satpam	12,100,000	0	12,100,000	0	12,100,000	100.00	0
000055. Keperluan Rumah Tangga Kantor	31,664,000	0	31,001,650	628,600	31,630,250	99.89 %	33,750
000056. Langganan Surat Kabar/Berita/Majalah	2,200,000	0	1,855,000	300,000	2,155,000	97.95 %	45,000
000057. Biaya Penjilidan	2,000,000	0	280,000	813,000	1,093,000	54.65 %	907,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 005 MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Organisasi** : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
**Satuan Kerja** : 663199 PENGADILAN MILITER I - 02 DI MEDAN

Hal 5 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	5,400,000	0	4,782,200	600,000	5,382,200	99.67 %	17,800
000098. Konsumsi	4,800,000	0	4,182,200	600,000	4,782,200	99.63 %	17,800
000099. Bahan	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	77,020,000	0	71,760,578	4,903,000	76,663,578	99.54 %	356,422
000058. keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai (Sumatera Utara)	60,020,000	0	60,017,909	0	60,017,909	100.00	2,091
000102. Tambahan Belanja Keperluan Sehari-hari	17,000,000	0	11,742,669	4,903,000	16,645,669	97.92 %	354,331
002.0B LANGGANAN DAYA DAN JASA	216,509,000	0	198,307,315	17,406,486	215,713,801	99.63 %	795,199
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	201,109,000	0	184,474,476	16,500,000	200,974,476	99.93 %	134,524
000059. Layanan Domain Website	500,000	0	366,300	0	366,300	73.26 %	133,700
000060. Langganan Lisensi Video Conference	2,609,000	0	2,608,176	0	2,608,176	99.97 %	824
000061. Langganan Internet	198,000,000	0	181,500,000	16,500,000	198,000,000	100.00	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,200,000	0	1,367,955	620,220	1,988,175	90.37 %	211,825
000062. Biaya Pengiriman Surat Dinas	2,200,000	0	1,367,955	620,220	1,988,175	90.37 %	211,825
522112 Belanja Langganan Telepon	2,000,000	0	1,326,700	286,266	1,612,966	80.65 %	387,034
000063. Langganan Telepon	2,000,000	0	1,326,700	286,266	1,612,966	80.65 %	387,034
522141 Belanja Sewa	11,200,000	0	11,138,184	0	11,138,184	99.45 %	61,816
000064. Web Hosting	11,200,000	0	11,138,184	0	11,138,184	99.45 %	61,816
002.0C PEMELIHARAAN KANTOR	390,405,000	0	360,604,455	24,210,088	384,814,543	98.57 %	5,590,457
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	206,875,000	0	206,853,000	0	206,853,000	99.99 %	22,000
000065. Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	6,500,000	0	6,478,000	0	6,478,000	99.66 %	22,000
000066. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200,375,000	0	200,375,000	0	200,375,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	183,530,000	0	153,751,455	24,210,088	177,961,543	96.97 %	5,568,457
000067. Pemeliharaan Mesin Foto Copy	5,378,000	0	5,378,000	0	5,378,000	100.00	0
000068. Pemeliharaan Genset 30 KVA	2,500,000	0	2,451,000	0	2,451,000	98.04 %	49,000
000069. Pemeliharaan AC Split	24,400,000	0	22,382,000	2,000,000	24,382,000	99.93 %	18,000
000070. Pemeliharaan Laptop / Notebook	7,300,000	0	5,574,400	620,000	6,194,400	84.85 %	1,105,600

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG**  
**Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
**Satuan Kerja : 663199 PENGADILAN MILITER I - 02 DI MEDAN**

Hal 6 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000071. Pemeliharaan Printer	6,900,000	0	6,605,000	70,000	6,675,000	96.74 %	225,000
000072. Bahan Bakar Genset	7,000,000	0	5,250,000	1,750,000	7,000,000	100.00	0
000073. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	81,552,000	0	69,657,270	11,043,528	80,700,798	98.96 %	851,202
000074. BBM Sewa Kendaraan Roda 4	20,000,000	0	15,550,000	4,300,000	19,850,000	99.25 %	150,000
000075. Pemeliharaan Inventaris Kantor	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	100.00	0
000076. Pemeliharaan PC	9,490,000	0	7,854,600	737,000	8,591,600	90.53 %	898,400
000077. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	17,760,000	0	11,799,185	3,689,560	15,488,745	87.21 %	2,271,255
<b>002.0D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR</b>	<b>85,148,000</b>	<b>0</b>	<b>78,440,000</b>	<b>6,708,000</b>	<b>85,148,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	44,900,000	0	44,900,000	0	44,900,000	100.00	0
000078. Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim	23,800,000	0	23,800,000	0	23,800,000	100.00	0
000079. Pakaian Seragam Olah Raga	14,100,000	0	14,100,000	0	14,100,000	100.00	0
000080. Pakaian Kerja Satpam	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00	0
000081. Pakain Kerja Pengemudi	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000082. Pakaian Kerja Pramubakti	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	40,248,000	0	33,540,000	6,708,000	40,248,000	100.00	0
000083. Honor Pejabat Pembuat Komitmen	15,912,000	0	13,260,000	2,652,000	15,912,000	100.00	0
000084. Honor Staf Pengelola Keuangan	5,472,000	0	4,560,000	912,000	5,472,000	100.00	0
000085. Honor Bendahara Pengeluaran	3,696,000	0	3,080,000	616,000	3,696,000	100.00	0
000086. Honor Pejabat Pembuat SPM	4,224,000	0	3,520,000	704,000	4,224,000	100.00	0
000087. Honor Kuasa Pengguna Anggaran	10,944,000	0	9,120,000	1,824,000	10,944,000	100.00	0
<b>002.0E HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM DAN HAKIM ADHOC</b>	<b>152,000,000</b>	<b>0</b>	<b>135,360,000</b>	<b>0</b>	<b>135,360,000</b>	<b>89.05 %</b>	<b>16,640,000</b>
522141 Belanja Sewa	152,000,000	0	135,360,000	0	135,360,000	89.05 %	16,640,000
000088. Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim	86,400,000	0	86,400,000	0	86,400,000	100.00	0
000100. Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim	65,600,000	0	48,960,000	0	48,960,000	74.63 %	16,640,000
<b>002.0H KONSULTASI KE PUSAT / TINGKAT BANDING</b>	<b>70,200,000</b>	<b>0</b>	<b>61,148,748</b>	<b>4,969,600</b>	<b>66,118,348</b>	<b>94.19 %</b>	<b>4,081,652</b>
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63,800,000	0	56,048,748	4,519,600	60,568,348	94.93 %	3,231,652

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 005 MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Organisasi** : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
**Satuan Kerja** : 663199 PENGADILAN MILITER I - 02 DI MEDAN

Hal 7 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000089. Tiket PP	32,074,000	0	29,694,729	2,378,600	32,073,329	100.00	671
000090. Transportasi	7,000,000	0	3,734,000	256,000	3,990,000	57.00 %	3,010,000
000091. Penginapan	14,728,000	0	12,622,019	1,885,000	14,507,019	98.50 %	220,981
000092. Uang Saku	9,998,000	0	9,998,000	0	9,998,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,400,000	0	5,100,000	450,000	5,550,000	86.72 %	850,000
000093. Transport Dalam Rangka Rekonsiliasi SAI	1,800,000	0	1,500,000	0	1,500,000	83.33 %	300,000
000094. Transport Dalam Rangka Rekonsiliasi SIMAK BMN	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000095. Transport Dalam Rangka Undangan Satker	4,000,000	0	3,000,000	450,000	3,450,000	86.25 %	550,000
002.01 KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPb/KPKNL	1,200,000	0	450,000	600,000	1,050,000	87.50 %	150,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	0	450,000	600,000	1,050,000	87.50 %	150,000
000096. Transport	1,200,000	0	450,000	600,000	1,050,000	87.50 %	150,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

# LAMPIRAN XII

## Money Rencana Aksi TW IV



**MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN IV  
TAHUN 2025  
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**



**PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

Jl. Ngumban Surbakti No. 45 Medan

Web: [www.dilmil-medan.go.id](http://www.dilmil-medan.go.id)

Telp/ Fax (061) 80047002

Email: [dilmil102mdn@gmail.com](mailto:dilmil102mdn@gmail.com)

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 TRIWULAN IV  
 PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	100	111.11%
		2. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	70	78.20	111.71%
		3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70	80.06	114.37%
		4. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	90	94.39	104.87%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengelolaan berkas perkara	Seluruh berkas perkara masuk yang dilimpahkan oleh Odmil I-02 Medan telah di	-	-

		register		
2.	Penetapan hari sidang	Seluruh berkas perkara yang telah di register telah di buat penetapan hari sidang	-	-
3.	Pemeriksaan di sidang pengadilan	Pada TW. IV TA. 2024 terdapat 37 berkas perkara masuk, semua perkara tersebut sudah di proses di persidangan.	-	-
4.	Minutasi/ Upaya Hukum	Pada TW IV TA 2024 telah dilaksanakan minutasi perkara sebanyak 39 perkara	Jumlah yang melakukan upaya hukum banding =12 perkara dan Kasasi =12 Perkara serta PK sebanyak 0 Perkara	-
5.	Pelaksanaan Survei	Telah dibentuk tim yang melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat penerima layanan Dilmil I-02 Medan untuk triwulan I s.d. IV tahun 2024	-	-
		Dilaksanakannya survei dan dibuat laporan survei per triwulan	Kurangnya minat responden mengisi survei secara elektronik	Diberikan blanko manual dan form secara elektronik survei kepada responden melalui web



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95	100	105.26

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mengirim salinan Putusan	Pada TW I TA 2024 telah dilaksanakan pengiriman salinan putusan sebanyak 36 perkara sesuai dengan jumlah perkara putus pada periode tersebut	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	80%	100%	125%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Sidang di luar gedung Pengadilan	Pelaksanaan sidang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pematang Siantar 04 Maret s.d 08 Maret 2024 dan tanggal 22 s.d. 26 Juli 2024	Target sidang keliling direncanakan 2 kali dan sudah dilaksanakan 2 kali serta target terlampaui . dimana target pertahun adalah 20 perkara dan telah dilaksanakan dan diselesaikan 16 perkara	Target sudah terlampaui dan akan tetap di pertahankan

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
1.	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	98	100	102.04
		Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98	100	102.04
		Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolatan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.	97	100	103.09

<b>NO</b>	<b>AKSI/KEGIATAN</b>	<b>URAIAN PROGRES PELAKSANAAN</b>	<b>URAIAN PERMASALAHAN</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
-----------	----------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------------

1.	1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan penyelenggaraan program dan anggaran	Pada TW IV sudah disusun rencana kinerja triwulan dan telah dilaksanakan dan direalisasikan dengan baik terbukti dari Monev Ditjenmiltun bahwa Dilmil I -02 Medan Mendapatkan hasil realisasi melampaui target dan nilai IKPA yang baik.	-	-
PTIP	2. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik	Pemanfaatan dan Penggunaan Teknologi Informasi Berjalan dengan lancar.	-	-
	3. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan	-Dokumentasi terlaksanan dengan baik berupa publikasi website, sosial media dll -Laporan-laporan pada triwulan I terkirim dengan tepat waktu.	-	-
2.	1. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana	Terlaksananya pengkoreksian Duk, Dus dan Bazetting seluruh Pegawai	-	-
Kepegawaian	2. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian organisasi dan tatalaksana	Terlaksananya pengkoreksian Ukp, Kgb, Ujian dinas, mutasi Hakim, Panitera, mutasi antar	-	-

		satuan dan Bimbingan Teknis		
	3. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kepegawaian organisasi dan tatalaksana	Terlaksananya monitoring dan evaluasi dibidang kepegawaian organisasi dan tatalaksana.	-	-
3.	1. Penyiapan bahan urusan pengelolaan administrasi keuangan	Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi keuangan	-	-
Umum,Keu	2. Penyiapan bahan urusan pengelolaan barang Milik Negara	Terlaksananya kegiatan penyiapan bahan pengelolaan barang milik negara	-	-
	3. Penyiapan bahan urusan pengelolaan administrasi umum dan sarana prasarana	Terlaksananya kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana	-	-

Medan, 12 Januari 2025

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan



Masykur

Kolonel Chk NRP 11970020230871